



MUBA MAJU
Lebih CEPAT

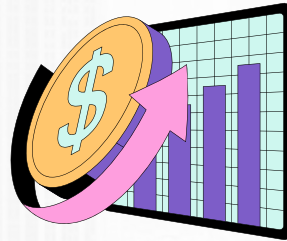
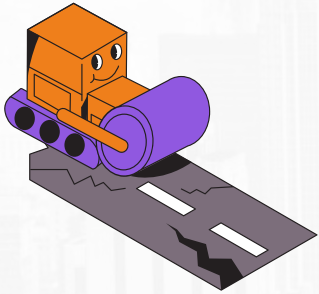
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemetintah Kabupaten Musi banyuasin tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) Tujuan strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja utama dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka ditetapkan fokus dan tema pembangunan tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”** dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal;
3. Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kawasan Komoditas Unggulan;
4. Perkuatan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
5. Penyediaan Fasillitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan Disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan;
6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
7. Optimalisasi RTH sebagai Sarana Rekreasi Masyarakat;
8. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan bagi Masyarakat;
9. Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat;
10. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan Implementasi Satu Data Muba;
11. Digitalisasi Akses Layanan Publik.

Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Tujuan Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan	%	12,88 %	13,85	9,97	138,92%
	2. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,25-4,75	4,39	92,42%
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	80,55	92,17	80,26	87,08%
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,27	70,25	73,17	104,16%

Terwujudnya Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	CC (60)	BB (75,36)	125,6%
--	----------------------------------	--------	----	---------	---------------	--------

Pada tujuan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, angka kemiskinan berhasil ditekan dari baseline 12,88% menjadi 9,97%, melampaui target 13,85 dengan capaian 138,92%. Pertumbuhan ekonomi terealisasi 4,39%, masih dalam kisaran target 4,25–4,75 dengan capaian 92,42%. Sementara itu, indeks pelayanan infrastruktur hanya mencapai 80,26 dari target 92,17, dengan capaian 87,08%.

Untuk tujuan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari baseline 72,27 menjadi 73,17, melampaui target 70,25 dengan capaian 104,16%.

Sedangkan pada tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Target CC (60) berhasil dilampaui dengan realisasi BB (75,36), capaian 125,6%.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.843.050.660.189,- atau sebesar 89% dari total pagu anggaran sebesar Rp4.313.840.074.910,-.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diukur atas dasar [enilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas

kinerja seluruh jajaran pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. M. TOHA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan akuntabilitas instansi Pemerintah dalam menjalankan kinerja Pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab (akuntabel) merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya Pemerintahan yang bersih, tertib, berkeadilan dan tegaknya supremasi hukum dalam tata kelola Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, maka dituntut kerja keras dan keseriusan penyelenggara Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem evaluasi masing-masing unit organisasi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan sekaligus merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi manajerial dan administratif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di turunkan dengan Peraturan Bupati No 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelopor Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, maka penyajian informasi pelaporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini difokuskan pada penjabaran atas capaian kinerja dalam periode satu tahun dengan memperhatikan indikator kinerja utama dan prioritas pembangunan tahun yang bersangkutan.

Demikian pula pada analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pelaporan kinerja ini didasarkan atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang dimungkinkan mempengaruhi capaian, permasalahan dan kendala yang ada.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sebagai Kabupaten yang terluas ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Kabupaten merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 (lima belas) persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, terbagi atas 15 wilayah Kecamatan dan 230 Desa dan 13 Kelurahan. Dari 15 Kecamatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki Desa/Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dimana jumlah Desa terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Lalan yaitu berjumlah 27 Desa/Kelurahan. Sedangkan Kecamatan terluas yaitu

Gambar 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin

[illegible]

Batas Geografis:

Kabupaten Musi Banyuasin secara administrasi terletak di Provinsi Sumatera Selatan berda pada ketinggian 20-140 meter di atas permukaan air laut (dpl). Terbentang dari 01° 18' 00" sampai dengan 4° 00'00" Lintang Selatan dan 103° 00'00" sampai dengan 105° 40'00" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan:

Kabupaten Musi Banyuasin secara administrasi terletak di Provinsi Sumatera Selatan berda pada ketinggian 20-140 meter di atas permukaan air laut (dpl). Terbentang dari 01° 18' 00" sampai dengan 4° 00'00" Lintang Selatan dan 103° 00'00" sampai dengan 105° 40'00" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan:

- 1-3

Musi Rawas Utara; dan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai topografi lahan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan kemiringan lahan, yaitu dataran rendah, bergelombang, dan berbukit. Sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di Daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 meter di atas permukaan laut.

Penyiapan data dan informasi dalam gambaran umum kondisi Daerah ini merupakan data yang dikelola dan diolah dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel 1.1.

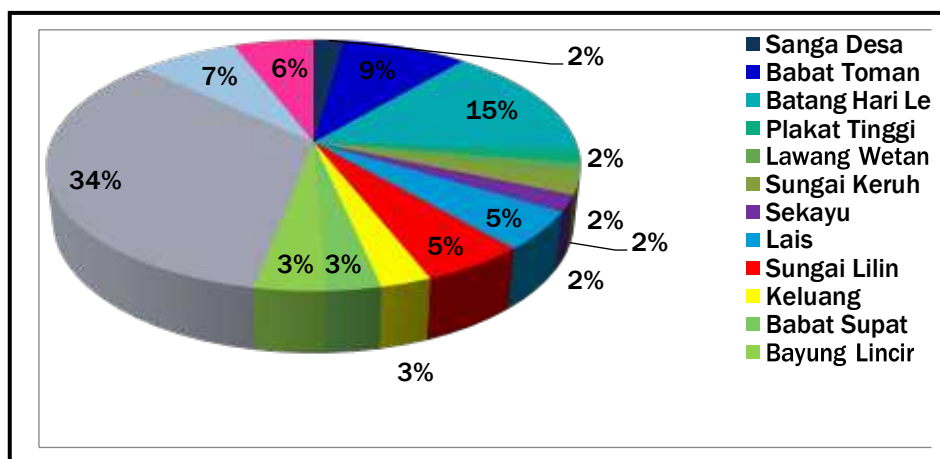
Tabel 1.1
Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah terhadap total (%)
1	Sanga Desa	317,00	2,22
2	Babat Toman	1.291,00	9,05
3	Batang Hari Leko	2.107,79	14,77
4	Plakat Tinggi	247,00	1,73
5	Lawang Wetan	232,00	1,63
6	Sungai Keruh	391,00	2,74
7	Sekayu	701,60	4,92
8	Lais	755,53	5,30
9	Sungai Lilin	374,26	2,62
10	Keluang	400,57	2,81
11	Babat Supat	511,02	3,58

12	Bayung Lencir	4.847,00	33,98
13	Lalan	1.031,00	7,23
14	Tungkal Jaya	821,19	5,76
15	Jirak Jaya	238,00	1,67
Jumlah		14.265,96	100

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

Gambar 1.2 Persentase Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berdasarkan Kecamatan



Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

1.3. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan nomenklatur maupun tugas pokok dan fungsinya. Daftar nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.

Perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah

NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)
1	2	3	
I	SEKRETARIAT	SEKRETARIAT	
	a. Sekretaris Daerah	a. Sekretaris Daerah	
	b. Staf Ahli Bidang :	b. Staf Ahli Bidang :	
	1. Hukum, Politik dan Pemerintahan	1. Hukum, Politik dan Pemerintahan	
	2. Pembangunan	2. Pembangunan	
	3. Keuangan	3. Keuangan	
	c. Asisten Bidang :	c. Asisten Bidang :	
	1. Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	2. Perekonomian dan Pembangunan	2. Perekonomian dan Pembangunan	
	3. Administrasi Umum	3. Administrasi Umum	
	d. Bagian	d. Bagian	
	1. Bagian Tata Pemerintahan	1. Bagian Tata Pemerintahan	
	2. Bagian Protokol	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

NO		PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)
		3. Bagian Kesejahteraan Rakyat	3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
		4. Bagian Penyelesaian Perbatasan	4. Bagian Sumber Daya Alam
		5. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	5. Bagian Administrasi Pembangunan
		6. Bagian Umum dan Pengadaan	6. Bagian Umum
		7. Bagian Telek dan Sandi	7. Bagian Kerjasama
		8. Bagian Hukum	8. Bagian Hukum
		9. Bagian Organisasi	9. Bagian Organisasi
		10. Bagian Keuangan	10. Bagian Perencanaan dan

					Keuangan
		11.	Bagian Hubungan Masyarakat		11. Bagian Perekonomian
					12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
II SEKRETARIAT DPRD			SEKRETARIAT DPRD		
III INSPEKTORAT			INSPEKTORAT		
IV DINAS DAERAH :			DINAS DAERAH :		
		1.	Dinas Pendidikan Nasional		1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Dinas Kesehatan		2. Dinas Kesehatan
		3.	Dinas PU Bina Marga		3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.	Dinas Sosial		4. Dinas Sosial
		5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		6. Dinas Komunikasi dan Informatika
		7.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		7. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
		8.	Dinas Perikanan		8. Dinas Perikanan
		9.	Dinas Pertanian dan Peternakan		9. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		10.	Dinas Perkebunan		10. Dinas Perkebunan
		11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)			PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)	
		13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar	13.	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah
		14.	Dinas PU Cipta Karya	14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		15.	Dinas Kehutanan	15.	Dinas Perhubungan

		16. Dinas Pertambangan dan Energi	16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		17. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	17.	Dinas Lingkungan Hidup
		18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18. Dinas Ketahanan Pangan	19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
V	LEMBAGA TEKNIS DAERAH / BADAN	LEMBAGA TEKNIS DAERAH / BADAN		
		1. BAPPEDA		1. BAPPEDA
		2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah		2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		6. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		7. RSUD

		8.Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal			
		9.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
		10.Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan			
		11.Badan Ketahanan Pangan			
		12.RSUD			
VI	SATUAN:		SATUAN:		
		1.Satuan Polisi Pamong Praja		1.Satuan Polisi Pamong Praja	
VII	KANTOR:		SATUAN:		
		1.Kantor Layanan Pengadaan		1.-	
		2.Kantor Perwakilan		2.-	
IX	KECAMATAN :		KECAMATAN :		
		1.Kecamatan Sekayu		1.Kecamatan Sekayu	
		2.Kecamatan Sungai Keruh		2.Kecamatan Sungai Keruh	
		3.Kecamatan Babat Toman		3.Kecamatan Babat Toman	
		4.Kecamatan Lawang Wetan		4.Kecamatan Lawang Wetan	
		5.Kecamatan Plakat Tinggi		5.Kecamatan Plakat Tinggi	
		6.Kecamatan Batanghari Leko		6.Kecamatan Batang Hari Leko	
		7.Kecamatan Keluang		7.Kecamatan Keluang	
		8.Kecamatan Lais		8.Kecamatan Lais	
		9.Kecamatan Sanga Desa		9.Kecamatan Sanga Desa	
		10.Kecamatan Sungai Lilin		10.Kecamatan Sungai Lilin	
		11.Kecamatan Babat Supat		11.Kecamatan Babat Supat	
		12.Kecamatan Tungkal		12.Kecamatan Tungkal	

		Jaya		Jaya
--	--	------	--	------

NO	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)	PERANGKAT DAERAH (PP NOMOR 18 TAHUN 2016)
	13. Kecamatan Bayung Lencir	13. Kecamatan Bayung Lencir
	14. Kecamatan Lalan	14. Kecamatan Lalan
	15. Kecamatan Jirak Jaya	15. Kecamatan Jirak Jaya
	X KELURAHAN :	X KELURAHAN :
	1. Kelurahan Kayuara	1. Kelurahan Kayuara
	2. Kelurahan Serasan Jaya	2. Kelurahan Serasan Jaya
	3. Kelurahan Soak Baru	3. Kelurahan Soak Baru
	4. Kelurahan Balai Agung	4. Kelurahan Balai Agung
	5. Kelurahan Babat	5. Kelurahan Babat
	6. Kelurahan Mangun Jaya	6. Kelurahan Mangun Jaya
	7. Kelurahan Sungai Lilin	7. Kelurahan Sungai Lilin
	8. Kelurahan Sungai Lilin Jaya	8. Kelurahan Sungai Lilin Jaya
	9. Kelurahan Bayung Lencir	9. Kelurahan Bayung Lencir
	10. Kelurahan Bayung Lencir Indah	10. Kelurahan Bayung Lencir Indah
	11. Kelurahan Ngulak I	11. Kelurahan Ngulak I
	12. Kelurahan Ngulak	12. Kelurahan Ngulak
	13. Kelurahan Keluang	13. Kelurahan Keluang

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin 2025

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
- e. Perumusan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- f. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan arah kebijakan berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- g. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Sekretariat Daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat Daerah;
- i. Pengendali dan pengarah pelaksanaan tugas lingkup para asisten dan staf ahli;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Inspektorat, Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, agar sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten meliputi Sekretariat Daerah dan DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

- m. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan Pemerintahan Daerah;
- n. Pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- o. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kabupaten dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- p. Pengendali administrasi keuangan dan aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Pemahaman dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- t. Pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- w. Pelayanan administrasi dan pembinaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah

2. Sekretariat DPRD

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektorat Daerah

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan.

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Badan Daerah

Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan, tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsipenunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kecamatan

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian wilayah;
- d. Pembimbingan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pembimbingan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. Pembimbingan pembangunan sosial;
- g. Pemberi petunjuk keagrariaan;
- h. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan
- i. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program.

7. Kelurahan

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 86 Tahun 2016 melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Pembimbingan dan pengkoordinasian wilayah;
- e. Pembimbingan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. Pembimbingan pembangunan yang meliputi pembinaan sosial;
- g. Pembimbingan keagrariaan;
- h. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan
- i. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program.

1.5. **PROFIL PEGAWAI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 20 Desember 2024 adalah 6.032 orang yang terdiri dari 560 orang Pejabat Eselon, 934 orang JFT Kesehatan, 2664 orang JFT Pendidikan, 519 JFT lainnya, dan 1348 orang JFU. Masing-masing struktural dan fungsional tersebut dibagi menurut golongan, jenis kelamin, pendidikan dan usia dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.4
Jumlah ASN menurut Jenis Jabatan

JABATAN		JUMLAH
Pejabat Struktural		560
a.	Eselon	560
Fungsional		5.465
a.	JFT Kesehatan	934
b.	JFT Pendidikan	2664
c.	JFT Lainnya	519
d.	JFU	1348
TOTAL		6.032

Grafik 1.2 Jumlah ASN Menurut Jenis Jabatan

Dari 560 orang Pejabat Eselon, jumlah terbesar ASN Struktural menurut golongan adalah golongan IV/a sebanyak 220 orang , jumlah terkecil adalah golongan II/a sebanyak 1 orang. Data Aparatur Sipil Negara Struktural menurut golongan ruang secara rinci sebagai berikut:

No.	JABATAN (ESELON)	JUMLAH
1	2 A	1
2	2 B	29
3	3 A	66
4	3 B	132
5	4 A	220
6	4 B	112
TOTAL		560

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2024

Menurut jenis kelamin, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi memiliki jumlah laki-perempuan banyak dari laki-laki. Jumlah ASN menurut jenis kelamin, sebagai berikut :

No.	Golongan	Pria	Wanita
1	IV/d	2	
2	IV/c	32	19
3	IV/b	282	320
4	IV/a	284	288

5	III/d	598	1012
6	III/c	356	639
7	III/b	351	757
8	III/a	221	329
9	II/d	133	123
10	II/c	95	75
11	II/b	44	24
12	II/a	17	9
13	I/d	13	1
14	I/c	6	
15	I/b	2	
TOTAL		2436	3596

Grafik 1.6 ASN menurut Jenis Kelamin

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2024

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas Aparatur Sipil Negara berpendidikan Strata II sebanyak 1109 orang dan minoritas berpendidikan Strata III sebanyak 3 orang. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

No.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	S3	3
2	S2	1109
3	S1	3501
4	D4	75
5	D3	713
6	D2	39
7	D1	10
8	SMA	548
9	SMP	28
10	SD	6
TOTAL		6.032

Grafik 1.7 ASN Struktural Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2024

1.6. ISU STRATEGIS

Sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Daerah harus memperhatikan berbagai kebijakan, peraturan dan situasi serta kondisi aktual dan isu-isu strategis lainnya, baik dalam skala nasional maupun skala regional.

Dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta Tema pembangunan Kabupaten MUBA Tahun 2024, yaitu **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”**.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin selain untuk mendorong terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, juga memperhatikan keselarasan program dengan urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga mendorong tercapainya arah kebijakan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, isu-isu yang timbul seyogyanya juga merupakan isu-isu dalam skala nasional dan regional, bahkan tidak menutup kemungkinan terkait dengan isu-isu internasional.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan agar fokus mencapai apa yang diinginkan. Selain itu, isu penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dalam tahun 2023-2026 adalah peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi general dan tematik serta digitalisasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi modern, peningkatan pengembangan infrastruktur dasar, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, pemerataan pembangunan antar kecamatan, pengembangan sektor hilir guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan

perkebunan, peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan peran dan generasi muda dan perempuan.

Upaya peningkatkan pelayanan publik dan profesionalisme Aparatur terkait dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan peningkatan kompetensi Aparatur.

Terkait isu-isu strategis kabupaten Musi Banyuasin, maka isu-isu strategis yang paling menentukan dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. **Kemiskinan**

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan.

2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Namun, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti migas dan batu bara dapat menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi. Diperlukan strategi pengembangan sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

3. **Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran di Musi Banyuasin masih menjadi perhatian, terutama bagi angkatan kerja muda. Penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, minimnya pelatihan vokasional, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Solusi yang dapat diterapkan antara lain

peningkatan pelatihan keterampilan berbasis industri dan penguatan program wirausaha bagi masyarakat melalui UMKM.

4. Pendidikan

Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan dengan masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya tingkat partisipasi sekolah, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan investasi di sektor pendidikan dan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dapat menjadi langkah strategis.

5. Kesehatan

Akses layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya tenaga medis, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan preventif. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran kesehatan, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat.

6. Infrastruktur Daerah

Infrastruktur jalan, transportasi, dan jaringan listrik masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi ini berdampak pada konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti deforestasi dan eksploitasi tambang, berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah industri dan pencemaran air masih menjadi tantangan utama. Diperlukan kebijakan yang lebih

ketat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi masih diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi pelayanan publik yang masih lambat, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan, serta tingkat korupsi yang masih perlu ditekan. Digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi solusi yang dapat diterapkan.

1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan program dan kegiatan pada periode yang akan datang.

1.8. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah – langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,

reformasi dan perbaikan kinerja Birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah, Sehingga dalam implementasi RPD ini tidak hanya melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki tantangan dan peluang kompleks kedepan.

Tabel 1.4
Keterkaitan Isu Strategi, Tujuan dan Sasaran

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1.	- Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran - Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian- Pemulihan pasca pandemi covid-19	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berdasarkan sistematika berikut ini:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.3 Profil Ekonomi Kabupten Musi Banyuasin
- 1.4 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.5 Profil Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- 1.6 Isu Strategis
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Kinerja
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.4 Prioritas Pembangunan

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.2 Capaian Kinerja Lainnya
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh Daerah pada masa transisi ini terdiri dari RPJPD, RPD, RKPD dan RENSTRA-PD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki dokumen yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian disinkronisasikan dengan RPD masa transisi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Selanjutnya RPD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kabupaten Musi Banyuasin. RPD ini juga sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 tahun. Rencana Pembangunan Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*Threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Daerah yang disusun mengandung tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Dari penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah baik nasional maupun provinsi dan permasalahan serta isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut maka perlu dirumuskan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan

dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif;

2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur keberhasilan dalam empat tahun, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Adapun indikator masing–masing tujuan yang di sajikan pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
		Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B

Sumber: RPD Kab. Musi Banyuasin tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini memiliki 3 tujuan utama seperti yang telah tertera di tabel 5.1 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator pencapaian tujuan, yaitu: Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara itu, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada Tahun 2026, diharapkan Angka Kemiskinan Kab. Muba sudah menurun menuju 13,35%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 3,45-5,00. Indeks pelayanan infrastruktur sudah membaik menjadi 93,37 pada tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkat pada tahun 2026 menjadi 70,78 dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi B.

2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran–sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Langkah-langkah penetapan sasaran pelayanan pemerintah daerah:

- a) Mereviu hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya;
- b) Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
- c) Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat daya saing daerah;

- d) Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan;

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah:

- 1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
- 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
- 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
- 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
- 5) Peningkatan kesejahteraan para petani;

Untuk mengukur kinerja sasaran digunakan indikator sasaran, indikator sasaran ditampilkan dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Daya beli dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.371	10.602	10.883	11.064	11.295
2.	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
	tenaga kerja terampil						
3.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan (ADHK)	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34
4.	Peningkatan Produktivitas sektor usaha mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (ADHK)	7,75	0,70	1,05	1,40	1,75
		Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (ADHK)	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82
5.	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	91,00	93,00	95,00	97,00	100,00
6.	Penyediaan	1) Persentase	64,04%	68,62%	73,14	76,52	80,10

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
	Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap			%	%	%
		2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	90,60%	95,20%	100%	100%	100%
		3) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	84,80%	92,50%	100%	100%	100%
		4) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	100%	78,97%	58,17 %	37,50 %	0%
7.	Peningkatan Kualiatas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	65,01%	65,51%	66,01 %	66,29 %	66,72 %
8.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,45	12,60	12,76	12,91	13,07
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
9.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45
10.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB
		Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	92	92
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Tabel 2.3 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	- Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran - Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Penguatan Dukungan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	Infrastruktur untuk Perekonomian - Pemulihan pasca pandemi covid-19		Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik

2.3. Tema Pembangunan

Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka ditetapkan fokus dan tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tema Pembangunan Kabupaten Muba Tahun 2023 – 2026

No.	Tahun	Tema Pembangunan
1.	2023	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan
2.	2024	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
3.	2025	Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih
4.	2026	Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi

2.4. Program Prioritas

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJP dan RPD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPD yang disusun saat ini keselarasan sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode RPD yang akan menjadi prioritas atau target yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun program prioritas daerah tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1 (PD 1) : Meningkatkan Produktivitas Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Program Prioritas Daerah (PPD):

PPD 1 : Peningkatan legalitas kepemilikan lahan petani;

PPD 2 : Peningkatan produktivitas serta kualitas komoditas untuk Pemenuhan kebutuhan domestik dan hilirisasi;

PPD 3 : Optimalisasi pengembangan UMKM dan IKM;

PPD 4 : Peningkatan investasi dengan menjaga iklim investasi yang Kondusif serta promosi investasi yang efektif dan tepat sasaran.

2. PRIORITAS DAERAH 2 (PD 2) : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN EKSTREM

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Penguatan perlindungan sosial;

PPD 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

PPD 3 : Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui akses Pelayanan dasar.

3. PRIORITAS DAERAH 3 (PD 3) : MENINGKATKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan konektivitas pada daerah sentra ekonomi;

PPD 2 : Pembangunan dan peningkatan SPAM ;

PPD 3 : Pembangunan dan peningkatan system pengelolaan air limbah domestik;

PPD 4 : Peningkatan dan pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman;

PPD 5 : Peningkatan dan pengamanan sumber daya air.

4. PRIORITAS DAERAH 4 (PD 4) : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan;

PPD 2 : Pencegahan kebakaran hutan;

PPD 3 : Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan;

PPD 4 : Penanggulangan bencana.

5. PRIORITAS DAERAH 5 (PD 5) : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan Pendidikan yang berkualitas;

PPD 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;

PPD 3 : Peningkatan peran generasi muda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

PPD 4 : Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal.

6. PRIORITAS DAERAH 6 (PD 6) : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan publik berbasis digital;

PPD 2 : Peningkatan manajemen kinerja ASN dan akuntabilitas;

PPD 3 : Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target – target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkelanjutan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (selfassessment) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukutannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi

yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Angka Kemiskinan	Persentase	15,05	14,35	13,85	13,35
		2) Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		3) Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	85,44	91,15	92,17	93,37
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,17	69,71	70,25	70,78
3.	Terwujudnya Tata Kelola	5) Indeks Reformasi	Indeks	C	CC	CC	B

	Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Birokrasi					
--	---	-----------	--	--	--	--	--

Sumber: Keputusan Bupati tentang IKU Kabupaten Tahun 2023-2026

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan pada tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja utama dan pada target yang akan dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Terdapat 3 (tiga) Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Indikator Kinerja Utama untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebelumnya berjumlah 26 Indikator dan telah dilakukan penyesuaian menjadi 5 indikator. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1.	Angka Kemiskinan	13,85
		2.	Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75

		3.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,25
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025

2.7. PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan program-program yang akan menunjang pembangunan daerah dengan menerapkan sinergitas dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tema pembangunan tahun 2025. Program-Program tersebut dapat dilihat secara rinci bersamaan dengan anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Progam dan Anggaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.740.800.795.981
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 44.666.483.931
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 79.586.229.799
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 917.594.700
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 196.237.000

6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	265.854.980
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	19.647.010.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	8.795.004.600
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	9.637.066.912
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	18.338.765.186
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	88.251.252.238
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	2.987.632.400
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	310.830.982.731
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	1.100.000.000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	5.890.000.000
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	7.885.133.450
17	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	19.710.000.000
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	50.683.086.756
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	2.484.450.710

20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	6.503.822.111
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	4.998.389.000
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	13.279.506.370
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	2.115.216.700
24	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	47.387.063.521
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	1.177.715.000
26	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp	418.587.050
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	4.644.780.600
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	978.035.525
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	743.103.000
30	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	934.046.550
31	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	272.961.246
32	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	156.533.000
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	492.805.500

34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	846.406.500
35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	3.741.363.738
36	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	81.902.388
37	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp	297.100.919
38	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	10.000.000.000
39	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	800.000.000
40	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	1.582.463.924
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	3.932.000.000
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	253.735.000
43	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	99.937.000
44	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	171.952.000
45	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	10.223.741.437
46	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	719.678.919

47	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	423.029.402
48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	6.213.532.523
49	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp	108.176.708
50	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp	138.223.000
51	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp	9.083.060.286
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	3.556.272.774
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	165.807.867
54	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	1.916.400.001
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	491.655.320
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	21.697.160.492
57	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	2.700.177.050
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rp	88.860.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	8.890.472.742
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	7.063.709.082

61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp	453.703.800
62	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp	300.000.000
63	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	350.000.000
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	450.000.000
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	892.199.600
66	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	3.368.179.850
67	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	513.305.500
68	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	624.739.000
69	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	1.633.167.050
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	420.000.000
71	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	119.604.000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp	1.678.028.500
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	80.807.820.111
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp	3.435.154.990

75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	1.263.217.775
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	1.282.600.401
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	3.528.249.850
78	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp	275.000.000
79	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	299.995.000
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp	345.716.000
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	2.513.666.278
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp	756.207.578
83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	2.837.260.350
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	2.278.464.756
85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	1.248.411.957
86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	1.730.000.150
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	1.319.020.000
88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	1.729.791.600

89	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	328.039.250
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	17.221.301.118
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	10.664.209.821
92	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp	1.621.167.700
93	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp	15.190.843.609
94	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp	385.839.000
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	7.570.698.265
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	622.268.378
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	4.124.214.850
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	1.451.212.000
99	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp	4.833.217.000
100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	372.898.040
101	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp	131.511.050
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	3.003.180.057

103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp	59.749.000
104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp	235.629.000
105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp	300.000.000
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	21.051.766.173
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	3.547.176.450
108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	38.736.777.649
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	3.190.149.781
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.498.428.750
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	511.017.096.808
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	2.171.453.529
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	5.795.600.000
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	7.294.300.550
115	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	975.589.524
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	3.599.999.200

117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	1.500.000.800
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	10.111.920.876
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	9.097.015.077
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	247.321.730
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	240.525.000
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	538.950.499
123	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	2.049.958.635
124	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	7.321.187.372
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	150.062.000
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp	399.937.890
127	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	700.000.000
Jumlah Anggaran		Rp	3.408.867.666.146

Sumber: Lampiran Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025

2.8. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan konsistensi dan sinkroni sasi atas kerangka kebijakan, tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Prioritas pembangunan berangkat dari suatu paradigma yang menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan strategis dalam tahun yang bersangkutan.

Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”**.

Adapun arah Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal;
3. Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kawasan Komoditas Unggulan;
4. Perkuatan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
5. Penyediaan Fasilitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan Disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan;
6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
7. Optimalisasi RTH sebagai Sarana Rekreasi Masyarakat;
8. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan bagi Masyarakat;
9. Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat;
10. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan Implementasi Satu Data Muba;
11. Digitalisasi Akses Layanan Publik.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan diterjemahkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan yang terukur, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, strategi yang ditempuh tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan akses terhadap sumber penghidupan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, peningkatan

kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal menjadi prioritas penting melalui pengembangan pelatihan berbasis kompetensi serta fasilitasi keterhubungan antara dunia usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dasar maupun pendukung kawasan komoditas unggulan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan konektivitas wilayah yang mampu membuka aksesibilitas serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Di sisi lain, penguatan iklim usaha yang kondusif terus diupayakan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah serta menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Dalam mendukung sektor pertanian dan perikanan, penyediaan fasilitas pasca panen dan akses pasar komoditas unggulan menjadi perhatian utama guna meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus menyediakan ruang publik yang representatif bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus strategis melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal utama dalam pembangunan daerah.

Terakhir, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong implementasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta percepatan implementasi Satu Data Muba. Digitalisasi layanan publik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, keseluruhan prioritas pembangunan Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta pelayanan publik yang bersih, efektif, dan akuntabel.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. LATAR BELAKANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Musi Banyuasin merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja utama tahun 2025 adalah sebesar **107,07%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Kabupaten Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan	%	12,88	13,85	9,97	138,92%	Sudah Tercapai
	2. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,25-4,75	5,11**	107,58%	Angka Sangat Sementara
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	80,55	92,17	80,26	87,08%	Belum Tercapai
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,27	70,25	73,17	104,16%	Sudah Tercapai
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	CC (60)	BB (75,36)	125,6%	Nilai Indeks RB belum rilis dari Kemenpan RB, angka tersebut berdasarkan hasil evaluasi sementara.

Sumber: data diolah dari BAPPEDA Kab. Muba

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebesar 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Tujuan Daerah dan Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1. Angka Kemiskinan
	2. Pertumbuhan Ekonomi
	3. Indeks Pelayanan Infrastruktur
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4. Indeks Pembangunan Manusia
Terwujudnya Tata Keolola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	5. Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025, Pemerintah Daerah telah menetapkan sejumlah tujuan strategis pembangunan yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Tujuan pertama adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Tujuan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur capaian tujuan ini, ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Angka Kemiskinan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan; (2) Pertumbuhan Ekonomi sebagai indikator dinamika dan perkembangan aktivitas ekonomi daerah; serta (3) Indeks Pelayanan Infrastruktur yang mencerminkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Tujuan kedua adalah Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Selanjutnya, tujuan ketiga yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Tujuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan penetapan tujuan dan Indikator Kinerja Utama tersebut, Pemerintah Daerah memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar evaluasi kinerja kepala daerah secara terukur dan akuntabel.

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

- *Angka Kemiskinan*
- *Pertumbuhan Ekonomi*
- *Indeks Pelayanan Infrastruktur*

Capaian Indikator-indikator Tujuan Pembangunan "Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih" Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin
1 Tahun 2025**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	13,85	9,97	138,92%
Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17	80,26	87,08%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

1. Angka Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan daerah yang secara konsisten menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Upaya ini dilaksanakan melalui perumusan kebijakan yang tepat sasaran, pelaksanaan program yang terintegrasi lintas perangkat daerah, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023–2026, penurunan angka kemiskinan ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama yang harus dicapai. Capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang signifikan, yang tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menggambarkan kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Perkembangan angka kemiskinan yang terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa kebijakan dan intervensi yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penurunan yang terjadi pada Tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Hal ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah

berada pada jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin. tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020 sampai 2025 menunjukkan tren penurunan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.1
Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin, diolah, 2025

Berdasarkan grafik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 16,13%, kemudian mengalami penurunan menjadi 15,84% pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 15,19% pada tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 14,90%, dan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2024 menjadi 12,88%. Hingga tahun 2025, persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga mencapai 9,97%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 3.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 - 2025



Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin, diolah, 2025

Sejalan dengan tren penurunan persentase penduduk miskin, perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2020–2025 justru menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp519.797, kemudian meningkat menjadi Rp537.774 pada tahun 2021 dan Rp566.393 pada tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 sebesar Rp593.258, sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp594.355, dan kembali mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai Rp627.094. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan adanya peningkatan standar kebutuhan minimum masyarakat, baik dari sisi konsumsi makanan maupun non-makanan, yang dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang positif sekaligus menantang, di mana meskipun standar kebutuhan hidup meningkat, persentase penduduk miskin tetap mampu ditekan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat relatif lebih baik dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Muba terus berupaya meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui 3 (tiga) program strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Salah satu indikator sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 yaitu menurunnya angka kemiskinan. Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan diestimasi proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei sehingga didapatkan angka/ tingkat kemiskinan. Capaian tersebut diperoleh dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten musu banyuasin}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Capaian kinerja Angka Kemiskinan tahun 2025 berdasarkan
perjanjian kinerja Kepala Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	13,85	9,97	138,92%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Angka Kemiskinan memiliki target Perjanjian Kinerja sebesar 13,85%, dengan realisasi sebesar 9,97%. Capaian kinerja yang diperoleh mencapai 138,92%, yang menunjukkan bahwa realisasi Angka Kemiskinan lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 jumlah penduduk miskin di kabupaten Musi Banyuasin adalah 69.610 jiwa. Ini menunjukkan penurunan dari Tahun sebelumnya. Tren jumlah penduduk miskin berfluktuatif sejak 2020-2025 menunjukkan penurunan.

1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2025		
	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	14,90%	12,88%	13,85	9,97	138,92%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Dalam dua tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan menunjukkan tren yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2,02% dan 2,91%. Capaian ini diraih melalui berbagai strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat dan penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Adapun yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen pimpinan dan sinergitas program Pengentasan Kemiskinan dengan *stakeholder* terkait. Kedepan, penggunaan DTSEN yang telah diverifikasi dan divalidasi akan diterapkan dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPD 2023-2026

Indikator	Tahun 2025			Target 2026 (RPD 2023-2026)
	Target	Realisasi	Capaian	
Angka Kemiskinan	13,85	9,97	138,92%	11,78%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Pada Tabel di atas, indikator Angka Kemiskinan pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 13,85% dengan realisasi 9,97%, sehingga capaian kinerja mencapai 138,91%. Realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target Tahun 2025 serta telah berada di bawah Target Dokumen RPD Tahun 2026 sebesar 13,35%, yang mengindikasikan percepatan pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen RPD 2023–2026.

1.4 Perbandingan realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025
dengan standar Provinsi dan Nasional

Indikator	Tahun 2025			Gap Terhadap Nasional
	Kabupaten Muba	Provinsi Sumatera Selatan	Nasional	
Angka Kemiskinan	9,97%	10,15%	8,47%	1,50

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 9,97%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan, yang berada pada angka 10,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin relatif lebih efektif dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional sebesar 8,47%, masih terdapat gap sebesar 1,50 poin persen terhadap capaian nasional, yang menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di daerah masih perlu terus diakselerasi agar dapat sejajar dengan kinerja nasional.

1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan, upaya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Evaluasi terhadap capaian kinerja menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan program, baik dalam bentuk keberhasilan maupun berbagai tantangan yang masih perlu disempurnakan. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan memastikan program kegiatan berhasil dan berdampak secara menyeluruh terhadap masyarakat miskin. Disisi lain, hambatan yang terjadi dalam implementasi program kegiatan penurunan kemiskinan menjadi evaluasi yang baik agar program penurunan kemiskinan dapat terlaksana dengan lebih baik. Berikut analisa keberhasilan, hambatan, dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan penurunan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil dari implementasi strategi percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut difokuskan pada tiga pendekatan utama.

Pertama, **pengurangan beban pengeluaran masyarakat**, yang dilakukan melalui optimalisasi program bantuan sosial, subsidi, serta intervensi pemenuhan kebutuhan dasar seperti seperti menyalurkan Bantuan Tunai (Bantu Umak), Bantuan Permakanan Penduduk Rentan (Bakul Nasi) dan Jaminan Sosial Jamkesda. Kebijakan ini berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin ekstrem. Kemudian melakukan stabilitas harga komoditas konsumsi orang miskin dengan memanfaatkan program Desa Cinta Statistik (Cantik) serta melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang pokok ketika terjadi lonjakan harga.

Kedua, **peningkatan pendapatan masyarakat**, yang diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi akses terhadap permodalan dan pasar. Langkah ini bertujuan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin sehingga mampu keluar dari jerat kemiskinan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan pendapatan melalui program Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia (Pedas Nia), KUBE/UEP, Program Keluarga Maju (PKM) dan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Pakai Kelambu)

Ketiga, **penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan secara terpadu**, melalui pendekatan berbasis wilayah dengan mengintegrasikan berbagai program lintas sektor. Intervensi dilakukan secara simultan pada Peningkatan akses layanan dasar seperti Jamkesda pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan (bedah rumah) dan peralihan listrik dari MEP ke PLN pada tahun 2024 dan 2025.

2. Kegagalan/Penurunan Kinerja

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya capaian kinerja.

Pertama, **pemakaian data sasaran penerima manfaat yang belum optimal**. Ketidaktepatan atau keterlambatan pembaruan data berdampak pada kurang tepatnya penetapan sasaran program, sehingga potensi inklusi dan eksklusi error masih terjadi. Hal ini berimplikasi pada efektivitas dan ketepatan intervensi yang dilaksanakan.

Kedua, **sinergi antar Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya yang belum optimal**. Koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih program atau kesenjangan intervensi di beberapa wilayah. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam percepatan penurunan kemiskinan.

3. Solusi/Alternatif Kebijakan

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi pelaksanaan program secara lebih terintegrasi sebagai berikut:

- a. **Optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)** sebagai satu-satunya rujukan data sasaran penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial. Pemanfaatan data yang akurat dan mutakhir akan meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
- b. **Peningkatan sinergitas antar program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta stakeholder lainnya**, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik. Strategi yang diterapkan tetap berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan secara terpadu. Dengan kolaborasi yang lebih solid, diharapkan intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, capaian kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan berbagai keberhasilan yang patut diapresiasi. Pada tahun 2025 Garis Kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin menyentuh angka 627.094. Tren garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin selalu meningkat beriringan dengan Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2024 garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin berada di atas garis kemiskinan Provinsi dan Nasional. Garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan Nasional selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan laju kenaikan yang cukup sama. Perlu diperhatikan lebih lanjut garis kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin selalu meningkat dan cukup tinggi

Rendahnya tingkat pertambahan garis kemiskinan dan drastisnya penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari masifnya program intervensi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara umum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk, Pemerintah melihat dari dua pendekatan yaitu: ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun non makanan dan kemampuan penduduknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program intervensi kemiskinan yang dilakukan telah memenuhi kedua sisi tersebut dan menyebabkan drastisnya penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025.

Dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi harga bahan pokok melalui rapat TPID dan program Desa Cantik serta melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang

pokok ketika terjadi lonjakan harga. Hal ini bermuara pada stabilnya harga barang pokok di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2023-2025. Kestabilan harga barang pokok ini membuat penduduk kabupaten Musi Banyuasin lebih mudah memenuhi kebutuhan pokoknya dan secara langsung mempengaruhi garis kemiskinan sehingga garis kemiskinan pada tahun 2025 tidak meningkat secara signifikan.

Selain menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, pendekatan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya juga tetap diperhatikan. Kemampuan untuk kebutuhan pokok ditunjang oleh solusi jangka pendek berupa pengurangan beban pengeluaran dan solusi jangka panjang berupa program peningkatan pendapatan. Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yang secara langsung membantu turunnya tingkat kemiskinan adalah program bedah rumah (Dinas Sosial, Dinas PU Perkim dan Baznas), bantuan Program Keluarga Maju (PKM) modal usaha perorangan dan kelompok, Khitanan massal, bantuan hukum gratis, isbat nikah, administrasi kependudukan, bantuan fakir miskin dari Baznas dan Fasilitasi Bantuan Sosial Masyarakat (Bantu Umak). Program peningkatan pendapatan yang dilakukan adalah berupa bantuan modal usaha baik perorangan (Bantu Ubak) maupun berkelompok (KUBE) dan peningkatan keterampilan usaha. Program meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan yaitu dengan penyediaan infrastruktur dasar berupa air bersih, gas rumah tangga, jamban sehat dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.

Adapun program strategis lainnya dalam program penurunan angka kemiskinan yaitu:

a. Bidang Kesehatan

Pembangunan Kesehatan telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran sektor tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan diantara program *Universal Health Coverage* (UHC) untuk semua masyarakat, pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan (29 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit), pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdarutan secara langsung (*Public Safety Service*) siaga 24 jam dengan sistem jemput bola dan program Bantuan Sayang Anak (Basanak).

Di tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin memberikan bantuan kepada ibu hamil dan Balita Stunting sebanyak 579 orang berupa susu selama 2 bulan. Dengan adanya program ini, sangat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, ibu hamil dan anak-anak akan keluar dari stunting. Selain itu juga Tahun 2025 dilakukan aksi konvergensi stunting, selain intervensi spesifik juga dilakukan intervensi sensitif dengan harapan penurunan angka prevalensi stunting dan mengurangi angka kemiskinan.

b. Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan telah dilaksanakan pendidikan gratis yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2002 sampai sekarang, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pendidikan kesetaraan (Paket B dan C), pemberian beasiswa (santri jadi dokter, *Sampurna Foundation*) dan di Tahun 2025 telah dilakukan seleksi siswa kurang mampu berprestasi untuk mendapatkan beasiswa yang berkerjasama dengan Telkom University Bandung dan Tazkia. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat komitmen menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Bidang Sosial

Di bidang Sosial dilaksanakan program bedah rumah (Dinas Sosial, Dinas PU Perkim dan Baznas), bantuan Program Keluarga Maju (PKM) modal usaha perorangan dan kelompok, Khitanan massal, bantuan hukum gratis, isbat nikah, administrasi kependudukan, bantuan fakir miskin dari Baznas dan Fasilitasi Bantuan Sosial Masyarakat (Bantu Umak). Bantu Umak dilaksanakan Tahun 2025 dengan skema bantuan disalurkan untuk 8.949 KK dan bantuan yang diberikan Rp. 325.000,- per jiwa selama delapan bulan dengan sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Untuk Tahun 2026 program ini dilanjutkan untuk sebanyak 3.000 KK karena dinilai efektif menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

d. Bidang Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan diupayakan mengoptimalkan serapan tenaga kerja lokal melalui program *Muba Vocational Center* (MVC). Program ini menyediakan tenaga kerja yang siap pakai dibidang Migas, batubara dan lain-lain. Selain itu juga ada pelatihan disabilitas dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan harapan mereka mendapat keterampilan serta bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan juga untuk menciptakan lapangan kerja.

e. Bidang Ketahanan Pangan

Dibidang ketahanan pangan telah dilaksanakan program pengadaan cadangan pangan, distribusi pangan pokok, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan penyediaan infrastruktur lumbung pangan. Semua program ini sangat membantu dalam penyediaan pangan untuk masyarakat dan mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

f. Bidang Pertanian, perkebunan dan Perikanan

Di bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan telah dilaksanakan program bantuan sarana dan prasarana pertanian, bantuan bibit ternak, rehabilitasi jalan usaha tani, jaringan

irigasi, pendampingan kelompok tani dalam mengelola pertanian yang berkualitas, replanting karet dan sawit, pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Dalam menciptakan kelestarian ikan di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan program pengembangan pembudi daya ikan kecil, pengembangan kapasitas nelayan kecil, fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Selain itu juga diberikan ikan segar kepada anak stunting dalam memenuhi kebutuhan protein bagi anak stunting.

g. Bidang Infrastruktur

Untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dilaksanakan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, sarana air bersih, jamban dan tanki septik dan penyediaan tanah untuk relokasi.

Semua program tersebut di atas akan terus dilanjutkan dengan harapan seluruh masyarakat miskin bisa diintervensi dengan berbagai pendanaan baik dari APBD, APBN, CSR, Baznas dan Dana Desa. Sangat diperlukan konvergensi antara seluruh *stakeholder* agar angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan.



1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Januari – Desember 2025) (Rp)	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	164.547.000	160.152.813	Semua Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang memerlukan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian Non Muslim)	Setiap penduduk Memiliki Dokumen Kependudukan	Kegiatan Dilaksanakan Dari Bulan Januari s.d Desember 2025
2	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	167.215.419	100.310.645	6000 Orang	Setiap penduduk Memiliki Dokumen Kependudukan	Kegiatan Dilaksanakan Dari Bulan Januari s.d Desember 2025
3	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	47.839.500	47.461.000	Semua masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang dokumen kependudukan bermasalah	Setiap penduduk Memiliki Dokumen Kependudukan	Kegiatan Dilaksanakan Dari Bulan Januari s.d Desember 2025
4	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Bagian Hukum Setda Kab. Muba	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	265.000.000	240.000.000	Masyarakat Miskin dalam Kab. Muba yang terkena kasus hukum (53 kasus = 37 Kasus Perdata dan 16 Kasus Pidana)	3.740.000,00 (Non Litigasi) 5.000.000,00 (Litigasi)	Diberikan hanya satu kali
5	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.271.433.825	27,633,039,108	Data P3KE dan DT-SEN	325.000/KK (Bantu UMAK) 40.000.000/KK (RS-RTLH)	12 Bulan/ 1 Tahun
6	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	1.471.563.000	1.328.206.846	Berdasarkan Proposal dari Perangkat Pemerintah Desa dan Panti	27.000/ Orang	12 Bulan/ 1 Tahun
7	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	220.415.700	205.388.500	disabilitas	-	1 kali
8	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	400.000.000	400.000.000	Masyarakat miskin	40.000.000 /unit	1 kali
9	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	312.434.000	272.091.279	DTKS/DT-SEN	-	-
10	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	304.180.000	290.206.000	Korban Bencana	-	12 Bulan/ 1 Tahun
11	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	265.951.800	132.601.835	Peserta Didik	-	12 Bulan/ 1 Tahun
12	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.227.871.850	517.489.850	Peserta Didik	-	12 Bulan/ 1 Tahun
13	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.193.000	8.769.754.965	Beasiswa untuk Mahasiswa	-	12 Bulan/ 1 Tahun



14	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	penanggulangan bencana	102.950.000	12.000.000	masyarakat terdampak bencana	membantu melakukan pencarian pertolongan	12 bulan
15	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	penanggulangan bencana	154.954.700	109.192.646	masyarakat terdampak bencana	membantu masyarakat yang terdampak bencana bersifat sementara	12 bulan
16	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.916.000	49.300.454	13927 Orang (Ibu hamil)	Tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu hamil (termasuk skrining & deteksi dini komplikasi pada ibu hamil)	1 (satu) tahun
17	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	219.741.000	142.097.929	2785 Orang (Ibu hamil, bersalin & bayi baru lahir dengan Faktor resiko sedang & Tinggi)	Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran di lokasi dekat dengan Fasilitas rujukan atau Rumah Sakit untuk ibu hami, bersalin & bayi baru lahir resiko tinggi	1 (satu) tahun
18	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	587.211.600	388.251.200	12661 bayi (Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada bayi baru lahir (termasuk skrining & deteksi dini komplikasi pada bayi baru lahir)	1 (satu) tahun
19	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.879.000	27.751.705	balita	53.152 orang	1 tahun
20	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38.428.499	36.224.416	anak usia pendidikan dasar	121.717 orang	1 tahun
21	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.965.000	11.893.471	Usia Produktif 15 -59 Tahun	17905 orang	1 Tahun kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif
22	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.016.000	31.785.818	Penderita Hipertensi 15 tahun keatas	12120 orang	1 Tahun kegiatan pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi
23	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.130.000	13.679.769	Penderita Diabetes Melitus 15 tahun keatas	10650 orang	1 Tahun kegiatan pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
24	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.036.000	19.062.660	Nakes	29 orang	1 tahun
25	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.400.000	22.966.350	9.403 orang	Pelaksanaan Skrining	1 (satu) tahun



26	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.230.000	24.705.168	17.725 orang	Capaian Pelaksanaan Skrining Januari-Oktober 2025 14.753 (83,2%)	1 (satu) tahun
27	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.922.000	29.441.146	Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada kondisi Bencana Alam dan Non Alam	Bantuan BMT Balita 30 kotak, BMT Hamil 60 Kotak dan Bantuan sarana OC ke pusku/Puskes 6 Buah, bantuan Obat-obatan yang dibutuhkan di posko kesehatan dan Jumlah Posko kesehatan yang didirikan pada lokasi bencana	1 Tahun
28	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.136.658.000	44.806.403.100	37.800 perjiwa	jaminan	per triwulan
29	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	88.196.000	77.090.625	120 KK / 4 Kelompok	Hibah Uang sebesar Rp.15.000.000,- per kelompok	Satu kali dalam 1 (satu) tahun, bantuan langsung diberikan melalui rekening kelompok
30	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	139.380.000	129.052.900	2000 Rumah tangga	5 Kg/KK	Pada saat terjadi bencana alam, daerah rentan rawan pangan atau terdapat permintaan CPP dari OPD pengusul
31	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	853.910.675	751.827.252	80.000 Anak Sekolah	Setiap Hari Sekolah	Setiap hari kerja / Jam sekolah 12 Bulan
32	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	40.987.545	35.035.642	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan pemerintah di bidang pangan	1 Dokumen	Satu kali dalam satu tahun
33	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.173.917.200	1.147.931.314	- Tahap Pengembangan : 15 Kelompok - Tahap Penumbuhan : 4 Kelompok	-Tahap Pengembangan : Rp.50.000.000,- per kelompok -Tahap Penumbuhan : Rp.75.000.000,- per kelompok	Satu kali dalam satu tahap dalam 1 (satu) tahun, bantuan langsung diberikan melalui rekening kelompok
34	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan	92.530.000	86.514.664	Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	31.530 /orang	1 kali



35	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	24.779.869.700	6.180.593.352	Data P3KE dan DTKS	5.000.000/ Orang (Bantu Ubak)	1 Kali Penyaluran
36	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	605.775.950	593.974.066	40 Kelompok	Poklahsar kerupuk kemplang 84.000.000/kelompok (cheest freezer, kompor gas,kuali,timbangan) dan Poklahsar Ikan Salai 63.000.000/kelompok (cheest freezer,drum,para-para,timbangan)	satu kali/pertahun
37	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Perikanan	Pengelolaan perikanan Tangkap	105.856.050	105.404.066	30 Orang	85.721.000 (pelatihan)	satu kali/pertahun
38	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Perikanan	Pengelolaan perikanan Tangkap	42.539.000	40.879.503	1 Kelompok	27.915.000 (sosialisasi)	satu kali/pertahun
39	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.462.365.806	1.223.974.524	170 orang (17 Kelompok)	Bantuan Benih Ikan lele 10.000 ekor, baskom grading 20 bh, keranjang 10 bh, pakan pembesaran 1.300 kg, pakan starter 100 kg, serok ikan 10 bh, timbangan 10 unit, waring 20 unit	satu kali/pertahun
40	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	100.000.000	90.000.000	40 Orang	2.500.000	Pemberian bantuan diberikan 1 kali
41	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	517.785.000	393.358.266	137 Orang	Bantuan UMKM Bakery 25 orang Senilai 5.520.000, Bantuan UMKM Pangkas Rambut 35 orang Senilai 2.433.000, Bantuan UMKM Tailor 35 orang Senilai 3.198.000, UMKM Bengkel Motor 42 orang Senilai 4.350.000	1 (Satu) kali dalam Satu Tahun
42	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.506.892.000	3.677.455.844	Pencari Kerja	1.984.417.000	1 Kali Pelaksanaan Pelatihan
43	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	152.769.925	1.800.000	Pencari Kerja dan Bekerja Disabilitas	-	1 Kali Pelaksanaan Pelatihan
44	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.095.810.600	458.876.069	-	-	1 tahun
45	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	116.512.500	56.312.780	Petani	70 Ha	1 tahun
46	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyuluhan Pertanian	741.527.067	450.210.960	Penyuluh dan Petani	2 KWT (60 orang)	1 tahun (Periode)



47	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyuluhan Pertanian	183.447.942	6.816.050	Petani	20 org x 3 unit	12 kali pertemuan x 3 kelompok
48	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	926.689.817	828.934.765	Masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin	-	1 kali
49	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	152.736.225	113.937.289	1. Pelaku Usaha Individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan ketrampilan dalam membuat suatu produk disektor industri rumahan 2. Peserta Pelatihan Home Industri dan keamanan pangan sebanyak 50 orang	-	1 kali
50	Peningkatan pendapatan masyarakat	Dinas Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	276.791.000	267.382.156	200 orang	Bantuan ikan lele segar 2 kg, Bantuan ikan patin segar 2 kg, Bantuan bakso ikan 3 kg dan Bantuan nugget ikan 3 kg	satu kali/pertahun
51	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	251.788.075	206.504.395	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1 kali
52	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	53.747.000	47.627.100	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1 kali
53	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198	14.013.900	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1 kali
54	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	143.434.000	91.343.800	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1 kali
55	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	55.464.000	41.096.600	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1 kali
56	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.536.778.400	11.682.754.050	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	134.000.000 - 200.000.000 / unit	1 kali
57	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.197.707.200	2.116.024.000	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	245.000.000 / 1350 meter	1 kali



58	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.792.898.200	8.536.875.000	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	15.000.000 - 30.000.000 / unit	1 kali
59	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	4.862.000.000	4.621.816.000	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	1.000.000.000 / 210 m2	1 kali
60	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	2.300.000.000	1.979.098.000	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	2.200.000.000/ 3460 m2	1 kali
61	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	22.884.904.000	22.255.050.000	warga desa dalam kabupaten Musi Banyuasin	50.000.000/unit	1 kali

Berdasarkan tabel di atas, program penanggulangan kemiskinan Tahun 2025 pada intinya dibagi menjadi tiga, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

- Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, dengan Anggaran sebesar Rp. 97.615.557.113,- terealisasi sebesar Rp. 86.814.465.092,-
- Program peningkatan pendapatan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp. 37.033.815.782,- terealisasi sebesar Rp. 15.724.355.668,-
- Program meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Anggaran sebesar Rp. 55.224.422.073,- terealisasi sebesar Rp. 51.592.202.845,-



Pada umumnya seluruh program sudah berjalan dengan baik, Capaian dari seluruh program dengan anggaran Rp. 189.873.794.968,- dengan realisasi Rp. 154.131.023.605,- (81,18%) telah dilaksanakan secara optimal dan berdampak pada masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muba didominasi oleh sektor-sektor yang berhubungan erat dengan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Beberapa komoditas utama yang menjadi pendorong ekonomi daerah ini adalah padi, jagung, kelapa sawit, karet, perikanan, dan migas. Sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muba, dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Selain itu, sektor industri dan perdagangan UMKM juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kabupaten Muba memiliki potensi untuk pengembangan hilirisasi, khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Pertumbuhan sektor ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Tabel 3.8

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Indikator	Tahun 2025		
	Target pada Perjanjian Kinerja	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75	5,11**	107,58%

**Sumber: BPS diolah*



Pada tabel di atas, indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berada pada kisaran 4,25–4,75%, namun realisasi justru mencapai 5,11%, melampaui batas atas target. Hal ini menghasilkan capaian sebesar 107,58%, yang menandakan efektivitas kebijakan ekonomi serta keberhasilan strategi pembangunan. Pertumbuhan di atas ekspektasi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, baik dari sisi konsumsi, investasi, maupun perdagangan. Selain itu, capaian ini memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas ekonomi, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap perlu dijaga agar tidak hanya bersifat sementara, melainkan konsisten dalam jangka panjang.

2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2025		
	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4,51	4,94	4,25-4,75	5,11**	107,58%

*Sumber: BPS diolah

Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tren yang cukup dinamis dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,51 persen, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,94 persen. Memasuki tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berada pada kisaran 4,25–4,75 persen. Realisasi yang dicapai adalah 4,39 persen, dengan capaian sebesar 92,42 persen terhadap target.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi, meskipun capaian belum sepenuhnya optimal.

2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

**Tabel 3.10****Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD 2026**

Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026	Progres Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75	5,11**	107,58%	4,35-5,00	98,8%

Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target kisaran 4,25–4,75 persen. Realisasi yang dicapai adalah 4,39 persen, sehingga capaian terhadap target mencapai 92,42 persen. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPD 2026 yang berada pada kisaran 4,35–5,00 persen, progres kinerja tahun 2025 menunjukkan pencapaian sebesar 98,8 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa meskipun capaian tahun 2025 belum sepenuhnya optimal terhadap target tahunan, secara keseluruhan progres menuju target akhir RPD 2026 sudah sangat baik, dengan tingkat pencapaian mendekati 100 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya konsistensi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi serta kesiapan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.11**Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

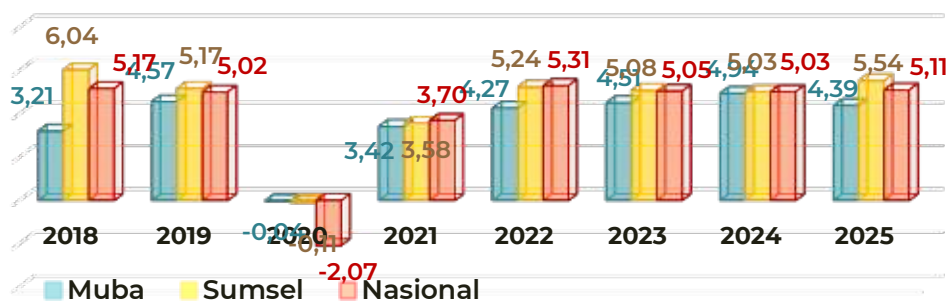
Indikator	Tahun 2024			Gap
	Kabupaten Muba	Provinsi	Nasional	
Pertumbuhan Ekonomi	5,11**	5,54	5,11	0,72

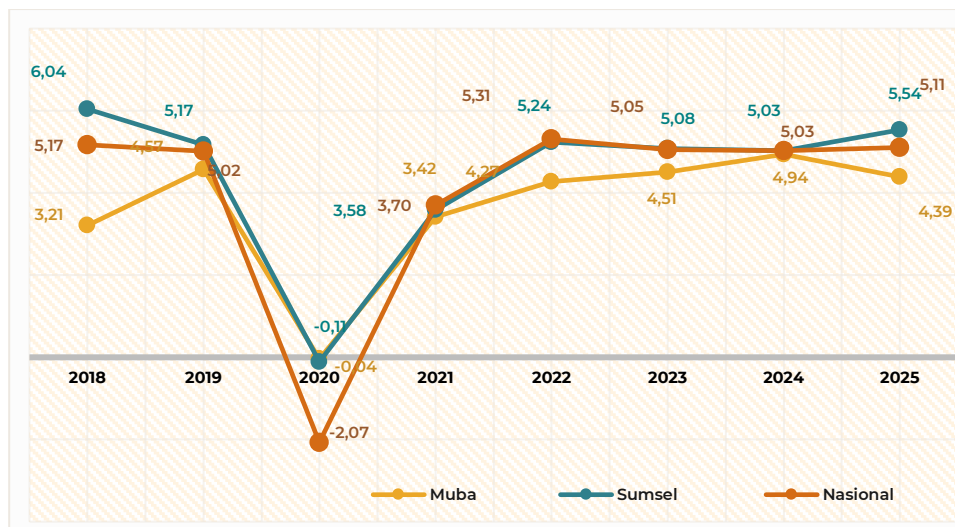
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,39 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi



Sumatera Selatan yang mencapai 5,54 persen, serta rata-rata Nasional sebesar 5,11 persen. Dengan demikian, terdapat gap sebesar 0,72 poin antara capaian Kabupaten Muba dan standar nasional.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Muba berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 4 persen, kinerjanya masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi maupun nasional. Gap tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pembangunan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan daya saing daerah agar lebih mendekati bahkan melampaui standar nasional.

Gambar 3.5**Pertumbuhan Ekonomi Kab. MUBA, Provinsi SUMSEL****Gambar 3.5.1****Pertumbuhan Ekonomi Kab. MUBA, Provinsi SUMSEL**



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pola yang hampir serupa. Pada tahun 2020, ketiga wilayah mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, di mana Kabupaten Musi Banyuasin dan Nasional turun hingga -2,07%, sementara Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih ringan di -0,11%. Setelah itu, ketiganya mulai pulih dengan tren positif.

Kabupaten Musi Banyuasin mencatat pertumbuhan moderat, bergerak dari 3,21% pada 2018 hingga 4,39% di 2025. Provinsi Sumatera Selatan tampil lebih kuat, sempat turun drastis tetapi kemudian bangkit hingga mencapai 5,54% pada 2025, menjadi yang tertinggi di antara ketiga wilayah. Sementara Nasional juga menunjukkan pemulihan stabil, dengan pertumbuhan 5,11% di 2025.

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa meskipun pandemi sempat menekan perekonomian, baik daerah maupun nasional mampu bangkit kembali, dengan Provinsi Sumatera Selatan mencatat kinerja paling impresif di akhir periode.

2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditentukan

Menurut Data BPS Tahun 2024, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang didorong oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Keberhasilan ini bukanlah hasil dari satu kebijakan atau program saja, melainkan gabungan dari berbagai upaya yang mencakup sektor ekonomi, infrastruktur, kebijakan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024:

- Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------	------	------



Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,64	4,30	5,10	6,87	4,58
-------------------------------------	------	------	------	------	------

Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami trend yang cukup baik setiap tahunnya. Trend peningkatan terjadi mulai dari tahun 2020 sebesar 2,64% menjadi 6,87% tahun 2023. Namun, adanya penurunan ditahun 2024 sebesar 4,58%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyesuaian harga komoditi.

b. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	1,27	2,94	10,31	9,61	3,16

Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Trend peningkatan terjadi mulai dari tahun 2020 sebesar 1,27% menjadi 10,31% tahun 2022. Namun, adanya penurunan ditahun 2023 sebesar 9,61% dan tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 3,16%. Penurunan tersebut disebabkan kurangnya prioritas dalam penguatan sektor industri pengolahan dapat menyebabkan ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor industri pengolahan perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambangan dan Penggalian	52,48	53,84	54,94	51,16	49,79

**sumber: BPS diolah*

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana bagi hasil pada sektor pertambangan/migas berada diatas 50% dari total APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio dengan realisasi sebesar 49,79%. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bagi hasil pada sektor migas.

c. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)



Lapangan Usaha / Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran	-0,37	7,75	9,42	10,57	9,81

Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari tahun 2020 rasio perdagangan besar dan eceran sebesar -0,37% meningkat menjadi 9,81% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)

Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-0,29	6,67	12,45	15,55	18,75

Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang sangat baik setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari tahun 2020 rasio penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,29% meningkat menjadi 18,75% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan dampak perekonomian masyarakat yang sudah membaik setelah pandemi *Covid-19*.

2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merencanakan program/ kegiatan/sub kegiatannya dengan berfokus kepada sasaran pencapaian laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

1. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan;
3. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan
4. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pertumbuhan sektor-sektor diatas dicapai melalui upaya-upaya berikut ini:



1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (untuk Laju Pertumbuhan Sektor PertanianKehutanan dan Perikanan).

Sektor ini dipacu pertumbuhannya melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah berikut ini:

- a. Dinas Perkebunan

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 276.173.250,-. Dalam bentuk pendampingan kepada petani kelapa sawit untuk melakukan replanting kelapa sawit seluas 1.069 Ha milik 488 pekebun.
- Melalui Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 2.709.221.400,-. Dalam bentuk pemberian bantuan sarana pendukung perkebunan berupa pupuk NPK, Handsprayer dan Mesin Pemotong Rumput kepada 23 Kelompok Tani.
- Melalui Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.174.295.900,-. Dalam bentuk pengadaan kecambah kelapa sawit sebanyak 80.000 butir, baby bag kelapa sawit sebanyak 1.400 batang dan benih pinang 45.000 benih untuk 24 kelompok tani.

- Program Pembangunan Prasarana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 98.557.200,-. Dalam bentuk pembangunan embung pertanian sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 1 unit.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 20.383.722.794,-. Dalam bentuk pembangunan, dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani sebanyak 44 ruas jalan.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan dam parit sebanyak 6 unit.



- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.800.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 16 unit.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 14.685.137.341,-. Dalam bentuk pembukaan lahan tanpa bakar dengan menggunakan alat berat untuk 12 Kelompok Tani serta pengadaan alat berat berupa 4 unit excavator yang akan disewakan kepada petani untuk pembukaan lahan tanpa bakar.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 20.383.722.794,-. Dalam bentuk pembangunan, dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani sebanyak 44 ruas jalan.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan dam parit sebanyak 6 unit.
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 4.800.000.000,-. Dalam bentuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk lahan perkebunan sebanyak 16 unit.

b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.087.966.888,- dalam bentuk pemberian bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 21 unit dan Traktor Roda 4 sebanyak 3 unit untuk 24 Kelompok Tani.
- Melalui Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 644.605.000,- dalam bentuk pemberian bantuan benih jagung dan dolomit untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Lalan.



- Melalui Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 317.164.000,- dalam bentuk pemberian bantuan benih padi label ungu, herbisida, insektisida, pupuk NPK untuk penangkaran benih padi unggul kepada 2 kelompok tani di Desa Bailangu Timur.
 - Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.825.536.013,- dalam bentuk pemberian bantuan alsintan berupa *Combine Harvester* sebanyak 3 unit, *power thresher* sebanyak 20 unit untuk 23 kelompok tani.
 - Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.334.679.000,- dalam bentuk pemberian bantuan bahan kimia/pupuk, bahan-bahan/bibit tanaman untuk pengembangan bawang merah 5 Ha kepada 1 kelompok tani.
 - Melalui Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota lain, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 3.592.752.000,- dalam bentuk pemberian bantuan ternak kambing, sapi dan ayam petelur kepada 20 kelompok peternak.
 - Melalui Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 295.350.000,- dalam bentuk belanja *Straw* (semen beku) sapi sebanyak 5.000 dosis dan belanja nitrogen cair sebanyak 10.000 Liter untuk keperluan inseminasi buatan.
- **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
- Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 887.028.496,- dalam bentuk pembangunan embung pertanian sebanyak 4 unit.
 - Melalui Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 229.119.951,- dalam bentuk perkerasan jalan usaha tani (JUT) dengan koral sebanyak 1 ruas jalan.
 - Melalui Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 822.010.000,- dalam pemberian bantuan pembangunan sumur bor 1 unit untuk 1 kelompok tani dan pembersihan lahan (*land clearing*) 180.000 M2 untuk 1 kelompok tani.



- Melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 300.000.000,- dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam (sumur bor) sebanyak 1 unit untuk 1 kelompok tani.
 - **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
 - Melalui Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 509.648.300,- dalam bentuk belanja obat ternak Ruminansia, obat ternak unggas dan vaksin ternak.
 - **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
 - Melalui Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 273.199.000,- dalam bentuk pengadaan fungisida 500 L, Pengadaan Molukisida 480 Kg dan Pengadaan Rodentisida 5.000 batang.
 - **Program Penyuluhan Pertanian**
 - Melalui Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 535.050.750,- dalam bentuk pelaksanaan sekolah lapang untuk 125 petani dan sosialisasi penerapan CSA untuk 75 petani.
- c. Dinas Perikanan
- Program-program yang dilaksanakan terdiri dari :
- **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
 - Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.055.308.000,- Dalam bentuk pemberian bantuan sarana penangkapan ikan berupa perahu, mesin perahu dan jala untuk 18 kelompok nelayan.
 - Melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.555.946.784,- dalam bentuk pemberian bantuan sarana penangkapan ikan untuk



4 koperasi perikanan berupa perahu, mesin perahu, jala, jaring, cool box, senter dan baju pelampung.

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.914.624.850,- dalam bentuk pemberian bantuan budidaya ikan lele dan nila di kolam terpal dan kolam tanah untuk 27 kelompok.
- Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 3.628.463.900,- dalam bentuk pemberian bantuan budidaya ikan lele dan nila untuk 7 Kelompok serta pembangunan 1 Unit Pembenihan Rakyat.
- Melalui sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 345.932.887,- dalam bentuk pemberian bantuan mesin pembuatan pakan ikan mandiri sebanyak 8 unit untuk 2 kelompok budidaya ikan.
- Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya Yang Dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 592.034.500,- dalam bentuk pengadaan benih ikan lokal yang akan dilepasliarkan di 6 (enam) lokasi perairan umum daratan dan pemberian bantuan alat tangkap ikan berupa perahu dan mesin perahu untuk 3 Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.

2. Peningkatan produktivitas sektor usaha mikro, IKM dan Industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (untuk Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan, Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Sektor-sektor ini dipacu pertumbuhannya melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah berikut ini:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Musi Banyuasin

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**



Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Dalam bentuk pelatihan untuk 120 orang Pengurus Koperasi dengan materi manajemen pengelolaan koperasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 324.754.400,-.

- **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.**

Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha serta peningkatan kemitraan usaha koperasi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 399.939.300,-.

Dalam bentuk pelatihan kepada 60 koperasi dengan materi peningkatan kemitraan usaha koperasi.

- **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 168.306.600,-.

Dalam bentuk pendampingan pengurusan perizinan terhadap 2500 pelaku usaha mikro.

- **Program Pengembangan UMKM.**

Melalui Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 6.307.797.180,-.

Dalam bentuk:

- 1) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro kepada 60 pelaku usaha,
- 2) Pelatihan Wirausaha Pemula kepada 80 pelaku usaha,
- 3) Bantuan Modal Kerja berupa Hibah Uang kepada 410 pelaku usaha, dan
- 4) Mengikuti Pameran Promosi Produk Usaha Mikro pada HUT UMKM, Sumsel Expo dan Smesco.

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin

Program-program yang dilaksanakan terdiri dari:

- **Program Sarana Distribusi Perdagangan**

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 17.070.863.200,-.



Dalam bentuk rehab berat dan rehab ringan pasar, penataan halaman pasar dan pembangunan los pasar di dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 9 unit.

- **Program Pengembangan Ekspor**

Melalui Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.008.760.100,- dan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 2.714.363.100,-. Keduanya dalam bentuk memfasilitasi pelaku usaha untuk ikut dalam pameran dagang dengan total sebanyak 64 pelaku usaha.

- **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Melalui Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 217.015.000,-.

Dalam bentuk pemasaran melalui kemitraan dengan hotel. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sebanyak 4 pelaku usaha.

- **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 136.385.314,- dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp469.557.886,-.

Dalam bentuk:

- 1) Bimtek Anyaman Purun untuk 20 pelaku usaha.
- 2) Fasilitasi Perizinan (HAKI dan Halal) untuk 33 pelaku usaha.
- 3) Bimtek Juleha (Juru Sembelih Halal) untuk 10 pelaku usaha.
- 4) Belanja Peralatan IKM Karet untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).
- 5) Belanja Peralatan IKM Permen Herbal Gambir untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).
- 6) Belanja Peralatan IKM Teh Herbal Gambir untuk 2 kelompok pelaku usaha (status ke pelaku usaha adalah pinjam pakai peralatan).

- **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**



Melalui Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 43.414.000,-.

Dalam bentuk penyusunan dokumen data IKM Tahunan yang mencatat perkembangan pertumbuhan IKM.

C. Dinas Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah:

- **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 14.550.000,-. Dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi penerbitan NIB dan P-IRT untuk 5 unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- Melalui Sub Kegiatan Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.169.738.000,-. Dalam bentuk pemberian bantuan usaha pengolahan hasil perikanan berupa chest freezer, drum, kompor gas, kuali, para-para, timbangan, vacuum sealer untuk 4 Poklamsar serta bedah Unit Pengolahan Ikan untuk 3 kelompok.

3. Peningkatan iklim investasi dan pelayanan perizinan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Upaya ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui program-program berikut ini:

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 45.835.750,- dan Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan alokasi pendanaan Rp 215.158.000,-.

Dalam bentuk:

- 1) Penyusunan dokumen Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Penyusunan Dokumen Infografis Potensi dan Peluang Investasi.



- **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 180.872.555,- dan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 91.865.500,-.

Dalam bentuk:

- 1) Penyediaan pelayanan perizinan sebanyak 1500 pelaku usaha.
- 2) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi sebanyak 10 pelaku usaha.

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Melalui Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 359.078.500,-.

Dalam bentuk pemberian bimbingan teknis kepada 566 pelaku usaha.

3. Indeks Pelayanan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur dasar yang memadai akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendukung konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Infrastruktur (IPI) adalah agregat dari pelayanan dasar infrastruktur digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar di suatu daerah. Dalam penilaian pelayanan infrastruktur ini yang ditetapkan targetnya adalah pelayanan jalan dalam kondisi mantap, air minum dan sanitasi. Berbagai upaya telah dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil, meskipun tantangan besar masih dihadapi, terutama luasnya wilayah dan kondisi geografi yang menyebabkan pemerataan infrastruktur belum merata di seluruh wilayah.

Untuk mengukur Target dan Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur setiap tahunnya sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam dokumen RPD Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 maka dilakukan perhitungan pada masing masing pelayanan infrastruktur yang sudah



ditetapkan. Layanan infrastruktur tersebut meliputi: 1. Infrastruktur Jalan; 2. Infrastruktur Air Minum; 3. Infrastruktur Sanitasi (Air Limbah).

Formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Infrastruktur sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{realisasi (Infrastruktur Jalan+Infrastruktur Air Minum + Infrastruktur Sanitasi (Air Limbah))}}{3} \times 100\%$$

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Tabel 3.12

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17	80,26	87,08%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan capaian indikator pelayanan infrastruktur sesuai tabel di atas maka capaian tersebut belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan infrastruktur masih memerlukan peningkatan peningkatan di berbagai aspek baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2025		
	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian



Indeks Pelayanan	78,01%	85,18%	92,17	80,26	87,08%
Infrastruktur					

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, kinerja Indeks Pelayanan Infrastruktur menunjukkan dinamika perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi indeks tercatat sebesar 78,01%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,18%. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah.

Namun demikian, pada tahun 2025, realisasi Indeks Pelayanan Infrastruktur tercatat sebesar 80,26%, masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92,17%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 87,08% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun 2024, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren yang fluktuatif, yaitu mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya salah satu indikator pembentuk Indeks Pelayanan Infrastruktur yang juga mengalami dinamika serupa, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap naik turunnya capaian indeks secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, tren kinerja Indeks Pelayanan Infrastruktur masih menunjukkan progres yang positif dalam jangka menengah, namun konsistensi peningkatan perlu terus dijaga melalui penguatan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPD 2026

Indikator	Tahun 2025			Target 2026	Progres Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian		



					(RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029)	
Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17	80,26	87,08%	85%	94,42%	

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Indeks Pelayanan Infrastruktur pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 92,17, realisasi yang dicapai adalah sebesar 80,26 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,08%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah hingga tahun 2026 sebesar 85%, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai progres kinerja sebesar 94,42%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 sudah mendekati target akhir jangka menengah yang direncanakan.

Indeks Pelayanan Infrastruktur merupakan indikator untuk mengukur tujuan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023–2026, yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Indikator ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang memberikan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel, baik terhadap pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran dilakukan secara agregat per jenis infrastruktur, sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu program/kegiatan dapat diidentifikasi secara lebih terarah.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada jalur yang cukup positif. Meskipun masih terdapat kesenjangan terhadap target tahunan, namun progres terhadap target jangka menengah menunjukkan arah yang baik, sehingga diperlukan konsistensi dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator	Tahun 2025	
-----------	------------	--



	Kabupaten Muba	Provinsi Sumatera Selatan	Nasional	Gap Terhadap Nasional
Indeks Pelayanan Infrastruktur	80,26%	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Indeks Pelayanan Infrastruktur Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 tercatat sebesar 80,26%. Capaian ini menunjukkan tingkat pelayanan infrastruktur daerah yang berada pada kategori baik sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah.

Namun demikian, untuk indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Nasional tidak menetapkan atau menghitung indikator yang sama dalam struktur pengukuran kinerja mereka. Dengan demikian, tidak terdapat data pembandingan pada tingkat provinsi maupun nasional, serta tidak dapat dihitung besaran kesenjangan (gap) terhadap standar provinsi dan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Infrastruktur merupakan indikator spesifik daerah yang digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, evaluasi capaian lebih difokuskan pada tren kinerja antar waktu (time series) serta keterkaitannya dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pelayanan Infrastruktur yang meningkat ditunjang dari seluruh indikator mikro yang juga meningkat, yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih, Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (Air Limbah) yang layak, Persentase Kawasan Kumuh Tertangani, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

1. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja yang pertama adalah Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan. Adapun kegiatan pemeliharaan dimaksud terdapat kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin, dimana berfungsi untuk mempertahankan infrastruktur tetap dalam kondisi baik.

2. Kegagalan/Penurunan Kinerja

Ketersediaan infrastruktur yang ada belum memberikan pengaruh signifikan terhadap rantai kegiatan ekonomi, karena meskipun infrastruktur telah tersedia, keberadaannya belum



sepenuhnya mampu mendorong perkembangan masyarakat di suatu wilayah, memacu aktivitas ekonomi, membuka akses yang lebih luas, serta memperlancar arus distribusi, khususnya ke daerah terpencil.

3. Solusi/Alternatif Kebijakan

Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.



Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- *Indeks Pembangunan Manusia*





Capaian Indikator-indikator Tujuan Pembangunan " Tercapainya Kualitas Sumber Data Manusia Yang Berdaya Saing" Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

**Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2025**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	70,25	73,17	104,16%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan di kabupaten Musi Banyuasin, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Provinsi Sumatra Selatan, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tantangan besar masih ada untuk meningkatkan IPM di wilayah ini.

Secara umum, IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan seiring dengan program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator penting dalam perhitungan IPM adalah angka harapan hidup (AHH), yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Kabupaten ini telah berusaha meningkatkan fasilitas kesehatan dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar, membangun puskesmas di beberapa kecamatan, dan meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan di Musi Banyuasin. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan beasiswa, serta pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Program pendidikan vokasi dan kejuruan juga dikembangkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap terjun ke dunia kerja, mengingat sektor ekonomi



Kabupaten Musi Banyuasin yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Di sisi lain, aspek ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat juga telah mengalami perbaikan. Perekonomian Musi Banyuasin sebagian besar didorong oleh sektor agraris, terutama perkebunan kelapa sawit, karet, dan perikanan. Pemerintah daerah berusaha untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan sektor industri dan pariwisata. Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan kesejahteraan.

Meskipun ada kemajuan, Kabupaten Musi Banyuasin masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah pedalaman, serta rendahnya tingkat partisipasi dalam sektor ekonomi formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus bekerja keras untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, meskipun IPM Kabupaten Musi Banyuasin masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatra Selatan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan harapan untuk peningkatan yang lebih signifikan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang lebih merata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan kesempatan ekonomi akan menjadi kunci untuk terus meningkatkan IPM di Kabupaten Musi Banyuasin.

4.1. Perbandingan antara target dan kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepada daerah;

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	70,25	73,17	104,16%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai lebih dari 100%. Namun, masih ada yang perlu diperbaiki agar pencapaiannya menjadi optimal diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan untuk semua lapisan



masyarakat dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.





4.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2025		
	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	71,30	72,27	70,25	73,17	104,16%

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Dalam tiga tahun terakhir, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin meningkat secara signifikan. Meskipun laju pertumbuhannya masih fluktuatif dan belum merata di semua dimensi, tren ini menunjukkan arah yang positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Peningkatan yang paling konsisten terjadi pada dimensi kesehatan, sementara dimensi pendidikan sering menjadi titik stagnasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka anak tidak sekolah, ketidakselarasan data administrasi, keterbatasan daya tampung sekolah, penyebaran guru yang tidak merata, serta minimnya layanan pendidikan di wilayah 3T menjadi penyebab utama keterlambatan laju peningkatan indikator pendidikan. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah pada dimensi yang kontribusinya masih lemah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten mengalokasikan sumber daya untuk mendorong peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia

4.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPD 2023-2026



Indikator	Tahun 2025			Target 2026 (RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029)
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Pembangunan Manusia	70,25	73,17	104,16%	73,07

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi IPM Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 73,17, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,25. Dengan demikian, tingkat capaian IPM mencapai 104,16%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

4.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.24

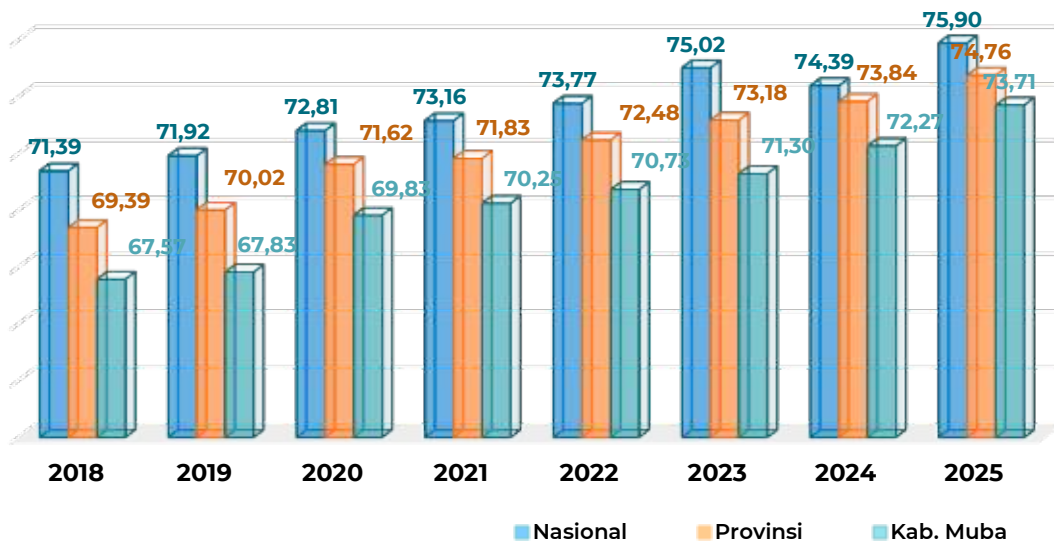
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional

Indikator	Tahun 2025			Gap Terhadap Nasional
	Kabupaten Muba	Provinsi Sumatera Selatan	Nasional	
Indeks Pembangunan Manusia	73,17	74,76	75,90	2,73

Sumber: BAPPEDA Kab. Muba, data diolah

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 73,17. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup stabil, namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,76 dan IPM Nasional sebesar 75,90. Selisih capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin terhadap nasional menunjukkan gap sebesar 2,73 poin.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat sejajar dengan capaian provinsi dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan guna mempercepat peningkatan IPM dan memperkecil kesenjangan dengan capaian nasional.

**Gambar 3.12****Perbandingan Realisasi IPM Muba, Sumsel dan Nasional Periode
2018 - 2025**

Pada gambar di atas, menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2018 hingga 2025. Secara umum, ketiga level pemerintahan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada periode tertentu.

Pada tingkat nasional, IPM mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari 71,39 pada tahun 2018 menjadi 75,90 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia secara berkelanjutan di Indonesia. Di tingkat provinsi, IPM juga meningkat dari 69,39 pada tahun 2018 menjadi 74,76 pada tahun 2025, meskipun terdapat sedikit perlambatan pertumbuhan pada tahun terakhir.

Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan dari 67,57 pada tahun 2018 menjadi 73,71 pada tahun 2025. Walaupun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, capaian IPM Kabupaten Muba masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, gambar tersebut mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami kemajuan positif, namun masih diperlukan



upaya yang lebih optimal dan terarah agar kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil di masa yang akan datang.

4.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pembangunan manusia merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator strategis yang menggambarkan capaian pembangunan dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak secara terintegrasi. Bagi Kabupaten Musi Banyuasin, peningkatan IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pembangunan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

Dalam perjalanannya, capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan adanya kemajuan yang didukung oleh berbagai upaya perbaikan akses dan kualitas layanan dasar. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta perumusan solusi dan alternatif kebijakan yang tepat guna mendorong percepatan peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengeluaran perkapita, komitmen pimpinan daerah dalam mendorong pembangunan manusia, serta perbaikan perencanaan dan pemanfaatan data sasaran pembangunan yang lebih tepat dan terarah.

2. Kegagalan/Penurunan Kinerja

1) Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Musi Banyuasin masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Hal ini mencerminkan bahwa rata-rata lama pendidikan yang diharapkan bagi penduduk masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga turut



mempengaruhi keberlanjutan pendidikan, sehingga berdampak pada belum maksimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

2) Ketimpangan wilayah memperlebar kesenjangan pembangunan manusia.

Ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan manusia. Perbedaan tingkat ketersediaan infrastruktur dasar, akses pendidikan, serta layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menyebabkan terjadinya kesenjangan capaian pembangunan manusia. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, sehingga upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan masih perlu terus ditingkatkan.

3. Solusi/Alternatif Kebijakan

1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mendorong peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan jangkauan layanan pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan program pendidikan nonformal dan kesetaraan. Dengan meningkatnya akses pendidikan yang merata, diharapkan partisipasi sekolah dapat meningkat dan berdampak pada perbaikan indikator Harapan Lama Sekolah.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.

Selain peningkatan akses, penguatan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi langkah strategis dalam mendukung kualitas proses belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan peningkatan dan pemerataan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas yang layak, ketersediaan tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan hasil pendidikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.



Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Baik

- *Indeks Reformasi Birokrasi*



**Tabel 3.28****Indikator Kinerja Utama pada Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin 3 Tahun 2025**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (60)	BB (75,36)	125,6%

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan dan pembaharuan dalam sistem birokrasi di suatu lembaga atau instansi pemerintah telah dilaksanakan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang dijalankan.

Reformasi birokrasi itu sendiri merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan menyempurnakan struktur, proses, dan budaya kerja dalam pemerintahan, agar lebih responsif, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi biasanya disusun berdasarkan beberapa komponen utama, seperti:

- 1) **Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan**
Menilai sejauh mana pimpinan suatu instansi dapat mengarahkan perubahan, mengelola inovasi, dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi yang berjalan.
- 2) **Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas**
Mengukur sejauh mana pengawasan internal dapat berjalan dengan baik dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program.
- 3) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
Menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan tersebut.

**4) Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat birokrasi, melalui pelatihan, pendidikan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan karier.

5) Efisiensi dan Efektivitas Organisasi

Menilai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan mengelola proses kerja secara efektif.

Indeks Reformasi Birokrasi menjadi alat evaluasi yang penting bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana implementasi reformasi birokrasi telah dilakukan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, IRB membantu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, modern, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.

5.1 Perbandingan antara target dan kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepada daerah;**Tabel 3.29****Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025**

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (60)	BB (75,36)	125,6%

**realisasi tahun 2025*

Pada tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan pada level CC (60). Namun, realisasi justru mencapai BB (75,36), sehingga capaian kinerja berada di angka 125,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lebih baik dari yang direncanakan.

Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama dari sisi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan hasil sementara ini, pemerintah tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampauinya, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan ke level yang lebih tinggi di masa mendatang.

5.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



Tabel 3.30

Perbandingan antara realisasi kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan beberapa tahun terakhir

Indikator	Realisasi (Tahun)		Tahun 2024		
	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	66,42 (B)	BB (73,54)	CC (60)	BB (75,36)	125,6%

**realisasi tahun 2025*

Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi berada di angka 66,42 (B). Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi BB (73,54). Target tahun 2025 ditetapkan pada level CC (60), namun realisasi justru mencapai BB (75,36). Dengan capaian tersebut, kinerja berhasil melampaui target hingga 125,6%.

Perbandingan ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi mengalami perbaikan konsisten, baik dari sisi nilai maupun kategori. Peningkatan dari B ke BB menunjukkan adanya penguatan dalam efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Peningkatan tersebut terjadi adanya dukungan terhadap peningkatan nilai Indeks RB dengan komponen kinerja utama yang mendukung antara lain Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Arsiparis, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks BerAkhlak, Nilai AKIP, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Nilai Sistem Kerja.

5.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Tabel 3.31

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir 2026

Indikator	Tahun 2025			Target 2026
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (60)	BB (75,36)	125,6%	B

**realisasi tahun 2025*



Pada tabel di atas, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2024. Target yang ditetapkan adalah CC (60), namun realisasi justru mencapai BB (75,36) dengan capaian 125,6%. Hal ini menandakan bahwa kinerja birokrasi tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya secara signifikan.

Jika dibandingkan dengan Target Akhir 2026, yaitu B, maka capaian tahun 2024 sudah berada di atas target antara (CC) dan bahkan mendekati level yang lebih tinggi. Dengan posisi BB (75,36), pencapaian ini memberikan landasan kuat untuk mencapai target akhir 2026.

Perbandingan ini menunjukkan tren positif dan konsistensi dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Capaian tahun 2024 yang melampaui target menegaskan bahwa reformasi birokrasi berjalan lebih cepat dari rencana, sehingga peluang untuk mencapai target akhir 2026 sangat besar.

5.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.32

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Indikator	Kabupaten Muba	Nasional	Gap
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	75,36	N/A	N/A

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muba pada tahun 2025 mencapai nilai 75,36 dengan kategori BB. Sementara itu, data standar nasional untuk tahun yang sama belum dirilis (N/A), sehingga perbandingan langsung terhadap capaian nasional tidak dapat dilakukan.

Dengan kondisi tersebut, gap antara capaian Kabupaten Muba dan standar nasional juga belum dapat dihitung. Namun, capaian Muba yang sudah berada pada kategori BB menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, meskipun posisi relatif terhadap standar nasional baru bisa ditentukan setelah data resmi nasional tersedia.

5.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut disebabkan oleh indikator-indikator mikro yang mendukung peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Opini BPK RI terhadap LKPD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa program reformasi birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki capaian yang beragam. Di satu sisi, terdapat sejumlah keberhasilan yang patut diapresiasi, terutama pada aspek pelayanan publik, tata kelola pengadaan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Survei Kepuasan Masyarakat mencatat skor tinggi dengan capaian lebih dari 90%, menandakan bahwa masyarakat cukup puas terhadap layanan yang diberikan. Demikian pula, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan mencapai lebih dari 93%, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan. Selain itu, tata kelola pengadaan barang/jasa sudah berada pada level proaktif dengan capaian di atas 92%, serta penerapan SPBE yang memperoleh indeks 3,78 atau 75,56%, menandakan kemajuan signifikan dalam digitalisasi birokrasi.

Namun demikian, sejumlah program masih menghadapi tantangan serius. Pembangunan Zona Integritas (ZI) belum menunjukkan capaian sama sekali, yang berarti upaya membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi masih jauh dari harapan. Indeks Sistem Merit ASN juga masih rendah, hanya mencapai 29% dari target, menandakan lemahnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen aparatur. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR juga belum optimal, dengan capaian tindak lanjut hanya 20% dan respon awal yang masih lambat. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan masih berada pada kategori “cukup”, dengan capaian sekitar 57%, sehingga perlu peningkatan dalam aspek perencanaan, evaluasi, dan transparansi.

Pada dimensi RB Tematik, capaian juga menunjukkan kelemahan. Program pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, serta penanganan stunting masih belum optimal, dengan capaian rata-rata di bawah 30%. Bahkan, pengendalian inflasi tidak menunjukkan capaian sama sekali. Hal ini menandakan bahwa intervensi kebijakan tematik belum sepenuhnya terintegrasi dalam rencana aksi yang komprehensif. Meski demikian, capaian dampak pengentasan kemiskinan dan investasi menunjukkan angka yang lebih baik, menandakan adanya hasil nyata di lapangan meskipun perencanaan dan tata kelola masih lemah.



Secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi sementara, keberhasilan Kabupaten Musi Banyuasin lebih menonjol pada aspek teknis-administratif seperti pelayanan publik, kepatuhan standar, dan digitalisasi birokrasi. Namun, kegagalan utama terjadi pada aspek substantif yang menyentuh integritas, meritokrasi ASN, serta kebijakan tematik pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi Musi Banyuasin sudah relatif baik dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi masih perlu penguatan serius dalam membangun budaya integritas, meritokrasi, serta efektivitas kebijakan pembangunan tematik.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menunjukkan kinerja anggaran yang cukup baik. Dari total anggaran sebesar Rp4.313.840.074.910, terealisasi sebesar Rp3.843.050.660.189 atau mencapai 89%. Capaian ini mencerminkan tingkat serapan anggaran yang optimal serta menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Tabel 3.36

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Sosial	Rp32.238.251.650	Rp13.440.048.061	42%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp30.583.867.825	Rp27.905.130.387	91%
Program Penanganan Bencana	Rp959.355.000	Rp895.356.961	93%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp2.091.978.700	Rp1.933.595.346	92%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp1.514.762.311	Rp1.154.950.938	76%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp0	Rp0	-
Program Penyuluhan Pertanian	Rp6.772.289.685	Rp5.267.778.136	78%
Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp1.190.081.000	Rp843.468.510	71%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp364.317.050	Rp72.212.545	20%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp4.506.892.000	Rp3.677.455.844	82%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp511.585.825	Rp233.587.713	46%
Program Hubungan Industrial	Rp371.027.000	Rp283.005.902	76%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp156.038.586	Rp153.717.042	99%



Program Pengembangan Transmigrasi	Rp0	Rp0	-
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp33.654.797.475	Rp30.627.622.786	91%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp19.944.404.408	Rp16.686.958.932	84%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp10.083.447.341	Rp9.751.915.528	97%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp13.587.876.747	Rp13.081.365.200	96%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp1.181.541.500	Rp855.676.925	72%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.721.105.175	Rp2.574.231.060	95%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp2.098.177.806	Rp1.826.987.224	87%
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp360.784.493	Rp342.220.409	95%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp239.665.750	Rp207.723.441	87%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Rp807.534.900	Rp784.680.250	97%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp103.004.000	Rp32.460.400	32%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp27.517.000	Rp14.735.000	54%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp206.928.959	Rp199.306.730	96%
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp1.385.407.855	Rp1.170.843.882	85%
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp350.949.378	Rp184.183.700	52%
Program Promosi Penanaman Modal	Rp395.431.400	Rp392.654.897	99%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp929.834.950	Rp904.537.346	97%
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp64.473.300	Rp31.356.570	49%
Program Pengembangan Umkm	Rp7.298.631.425	Rp7.150.512.103	98%
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp829.699.200	Rp828.530.853	100%



Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp173.292.250	Rp157.049.370	91%
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp218.295.000	Rp217.371.982	100%
Program Pengembangan Ekspor	Rp4.633.978.740	Rp3.907.632.591	84%
Program Penilaian Ksp/Usp Koperasi	Rp247.357.000	Rp244.392.880	99%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp771.243.450	Rp691.175.678	90%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp884.861.000	Rp615.248.650	70%
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp198.404.040	Rp118.998.800	60%
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp494.492.839.261	Rp412.225.770.736	83%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp550.000.000	Rp0	0%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkuran Jalan (LLAJ)	Rp26.027.592.200	Rp23.200.232.151	89%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp18.206.988.000	Rp16.434.646.850	90%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp19.926.238.650	Rp19.504.598.564	98%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp26.580.681.410	Rp24.708.538.750	93%
Program Kawasan Permukiman	Rp0	Rp0	-
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp1.636.001.800	Rp1.512.640.531	92%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp96.933.234.963	Rp87.681.320.721	90%
Program Pengembangan Permukiman	Rp0	Rp0	-
Program Pengembangan Perumahan	Rp11.405.988.800	Rp10.693.286.050	94%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp70.645.251.607	Rp68.938.604.900	98%
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp1.161.413.750	Rp1.071.626.130	92%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp0	Rp0	-
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp25.934.904.000	Rp25.305.050.000	98%



Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp127.423.000	Rp103.394.558	81%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp84.114.000	Rp52.108.704	62%
Program Penanggulangan Bencana	Rp11.775.680.571	Rp7.137.427.012	61%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp0	Rp0	-
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp3.607.945.250	Rp3.105.579.234	86%
Program Pengelolaan Persampahan	Rp13.168.614.728	Rp12.520.119.263	95%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.060.693.174	Rp900.552.842	85%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp0	Rp0	-
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp49.711.000	Rp32.603.811	66%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp397.795.000	Rp389.145.879	98%
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp203.147.500.620	Rp176.378.594.286	87%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp8.771.193.000	Rp8.769.754.965	100%
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp5.203.242.825	Rp5.111.715.158	98%
Program Pembinaan Sejarah	Rp343.150.000	Rp342.635.650	100%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp286.397.500	Rp278.225.521	97%
Program Pengelolaan Permuseuman	Rp415.351.000	Rp412.072.000	99%
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp2.031.959.225	Rp1.784.546.017	88%
Program Pemasaran Pariwisata	Rp2.148.770.800	Rp2.095.104.372	98%
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp3.302.670.500	Rp2.869.883.710	87%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp370.561.128	Rp281.812.721	76%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp7.140.180.896	Rp6.264.923.410	88%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp335.008.911	Rp327.194.013	98%



Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp151.499.254.397	Rp133.574.864.735	88%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp40.987.545	Rp35.035.642	85%
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp602.418.925	Rp581.285.947	96%
Program Pengawasan Dan Keamanan Pangan	Rp163.727.019	Rp136.593.249	83%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp99.387.200	Rp61.180.378	62%
Program Pengelolalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp0	Rp0	-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp3.181.772.150	Rp3.084.658.438	97%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp98.738.256.811	Rp91.163.304.931	92%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp904.676.500	Rp678.547.924	75%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp123.364.900	Rp119.699.924	97%
Program Pengendalian Penduduk	Rp578.531.200	Rp412.407.366	71%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.307.555.000	Rp1.294.675.611	99%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp2.151.697.392	Rp1.834.930.635	85%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp1.266.478.000	Rp916.165.571	72%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp0	Rp0	-
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp782.807.400	Rp637.057.709	81%
Program Perlindungan Perempuan	Rp170.967.000	Rp152.439.364	89%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp388.992.996	Rp270.823.599	70%
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp265.303.354.034	Rp233.767.850.661	88%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp553.346.254.113	Rp533.996.523.415	97%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp1.130.733.500	Rp957.115.959	85%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp4.555.903.900	Rp3.056.039.552	67%



Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.157.755.950	Rp2.801.448.229	89%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.348.824.500	Rp1.239.373.155	92%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.961.857.167	Rp1.717.056.814	88%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp2.185.586.820	Rp1.933.640.268	88%
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp1.188.250.100	Rp937.123.166	79%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.832.762.446.630	Rp1.638.561.217.477	89%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Rp1.742.217.170	Rp1.728.073.545	99%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp343.355.140	Rp292.443.515	85%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp6.002.762.000	Rp5.980.019.495	100%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp71.504.000	Rp68.667.742	96%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp381.819.890	Rp243.381.606	64%
Program Penataan Desa	Rp0	Rp0	-
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp97.640.900	Rp77.942.710	80%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp6.154.538.513	Rp5.614.283.526	91%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp2.817.447.400	Rp2.469.868.533	88%
Program Kepegawaian Daerah	Rp6.524.910.175	Rp5.407.074.454	83%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp5.927.507.650	Rp5.491.440.476	93%
Program Pengelolaan Arsip	Rp423.801.618	Rp327.706.149	77%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal	Rp59.802.000	Rp58.420.074	98%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.129.583.525	Rp1.081.214.501	96%



Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp29.528.902.961	Rp18.558.942.390	63%
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp1.625.459.710	Rp1.312.193.046	81%
Program Penanggulangan Bencana	Rp534.583.537	Rp523.852.886	98%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp4.948.931.000	Rp4.709.365.502	95%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp3.637.892.560	Rp3.073.687.882	84%
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp1.027.578.054	Rp979.208.391	95%
Program Pengelolaan Penerbangan	Rp48.020.000	Rp47.163.218	98%
Program Pendaftaran Penduduk	Rp452.701.919	Rp364.238.872	80%
Program Pencatatan Sipil	Rp255.141.402	Rp249.906.799	98%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp5.557.207.109	Rp5.023.433.261	90%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp51.919.700	Rp51.825.575	100%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp22.255.725.924	Rp20.981.208.831	94%
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp2.009.311.975	Rp1.641.294.205	82%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp101.284.430	Rp69.185.000	68%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp8.467.406.685	Rp7.180.710.106	85%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp277.491.999	Rp214.871.615	77%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp7.898.070.130	Rp5.694.346.295	72%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp135.609.500	Rp97.802.500	72%
Program Aplikasi Informatika	Rp11.957.160.541	Rp10.773.958.959	90%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp766.009.363	Rp422.475.075	55%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp1.552.730.108	Rp1.030.527.015	66%
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp8.204.016.430	Rp7.394.477.640	90%
Total	Rp4.313.840.074.910	Rp3.843.050.660.189	89%

Sumber: Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SIPD



Berdasarkan pada tabel di atas, pada urusan sosial dan perlindungan masyarakat sebagian besar program menunjukkan capaian tinggi, seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (91%), Program Rehabilitasi Sosial (92%), serta Program Penanganan Bencana (93%). Namun demikian, Program Pemberdayaan Sosial masih mencatat capaian relatif rendah sebesar 42%, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terhadap kendala pelaksanaannya.

Di sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, mayoritas program menunjukkan serapan anggaran yang sangat baik. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (97%), Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (96%), Pengelolaan Perikanan Tangkap (95%), serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (97%) mencerminkan dukungan kuat terhadap penguatan sektor primer daerah. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Pada sektor infrastruktur, khususnya Program Penyelenggaraan Jalan yang memiliki porsi anggaran terbesar, realisasi mencapai 83%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (98%), Sistem Drainase (93%), serta Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (98%) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa program dengan realisasi rendah atau belum berjalan, seperti Program Pengembangan Jasa Konstruksi (0%).

Di bidang pendidikan dan kesehatan, realisasi anggaran juga cukup tinggi. Program Pengelolaan Pendidikan mencapai 87%, sedangkan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mencapai 88%. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, pada urusan pemerintahan umum dan penunjang, beberapa program strategis seperti Program Pengelolaan Keuangan Daerah (97%), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (89%), serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (63%) menunjukkan variasi capaian. Secara umum, sebagian besar program berada pada kisaran 80–100%, yang mengindikasikan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan terkendali.

Di sisi lain, terdapat sejumlah program dengan realisasi rendah, antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja (20%), Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



(32%), serta beberapa program yang belum memiliki alokasi anggaran. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Tahun 2025 menunjukkan distribusi anggaran yang luas pada berbagai sektor prioritas, dengan tingkat serapan yang relatif tinggi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa program yang memerlukan peningkatan efektivitas dan percepatan realisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

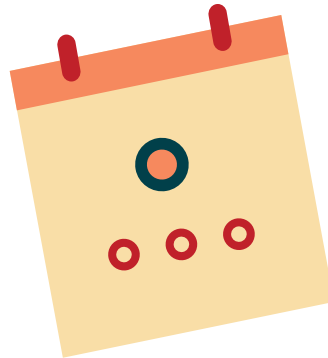
Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 3 (tiga) tujuan daerah dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang dihasilkan dari pengukuran dan penilaian kinerja berkualitas telah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat tercapai. Kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu merupakan buah dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penetapan kinerja yang rasional dan terukur dengan perencanaan kinerja yang mendasarkan pada problematika daerah secara berkualitas dan penilaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPD dan RKPD 2025, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk

perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisa diakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. TOHA., SH

Jabatan : BUPATI MUSI BANYUASIN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sekayu, Maret 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H.M. TOHA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1.	Angka Kemiskinan	13,85
		2.	Pertumbuhan Ekonomi	4,25-4,75
		3.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	92,17
2.	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,25
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC

No.	Program	Anggaran	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	1.740.800.795.981
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	44.666.483.931
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	79.586.229.799
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	917.594.700
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	196.237.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	265.854.980
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	19.647.010.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	8.795.004.600
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	9.637.066.912
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	18.338.765.186
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	88.251.252.238
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	2.987.632.400
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	310.830.982.731
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	1.100.000.000

No.	Program	Anggaran	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	5.890.000.000
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	7.885.133.450
17	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	19.710.000.000
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	50.683.086.756
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	2.484.450.710
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	6.503.822.111
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	4.998.389.000
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	13.279.506.370
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	2.115.216.700
24	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	47.387.063.521
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	1.177.715.000
26	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp	418.587.050
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	4.644.780.600
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	978.035.525
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	743.103.000
30	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	934.046.550
31	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	272.961.246
32	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	156.533.000
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	492.805.500
34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	846.406.500
35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	3.741.363.738
36	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	81.902.388
37	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp	297.100.919
38	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	10.000.000.000
39	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	800.000.000
40	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	1.582.463.924

No.	Program	Anggaran
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 3.932.000.000
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 253.735.000
43	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 99.937.000
44	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 171.952.000
45	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 10.223.741.437
46	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 719.678.919
47	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 423.029.402
48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 6.213.532.523
49	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 108.176.708
50	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 138.223.000
51	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 9.083.060.286
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 3.556.272.774
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 165.807.867
54	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 1.916.400.001
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 491.655.320
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 21.697.160.492
57	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 2.700.177.050
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rp 88.860.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 8.890.472.742
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 7.063.709.082
61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 453.703.800
62	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 300.000.000
63	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 350.000.000
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 450.000.000
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 892.199.600
66	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 3.368.179.850

No.	Program	Anggaran
67	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 513.305.500
68	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 624.739.000
69	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.633.167.050
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 420.000.000
71	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 119.604.000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.678.028.500
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 80.807.820.111
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 3.435.154.990
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 1.263.217.775
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 1.282.600.401
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 3.528.249.850
78	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 275.000.000
79	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 299.995.000
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 345.716.000
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 2.513.666.278
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 756.207.578
83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 2.837.260.350
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 2.278.464.756
85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 1.248.411.957
86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 1.730.000.150
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.319.020.000
88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.729.791.600
89	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 328.039.250
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 17.221.301.118
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 10.664.209.821
92	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 1.621.167.700

No.	Program	Anggaran	
93	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp	15.190.843.609
94	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp	385.839.000
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	7.570.698.265
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	622.268.378
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	4.124.214.850
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	1.451.212.000
99	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp	4.833.217.000
100	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	372.898.040
101	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp	131.511.050
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	3.003.180.057
103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp	59.749.000
104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp	235.629.000
105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp	300.000.000
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	21.051.766.173
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	3.547.176.450
108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	38.736.777.649
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	3.190.149.781
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.498.428.750
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	511.017.096.808
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	2.171.453.529
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	5.795.600.000
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	7.294.300.550
115	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	975.589.524
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	3.599.999.200
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	1.500.000.800
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	10.111.920.876

No.	Program	Anggaran	
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	9.097.015.077
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	247.321.730
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	240.525.000
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	538.950.499
123	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	2.049.958.635
124	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	7.321.187.372
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	150.062.000
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp	399.937.890
127	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	700.000.000
Jumlah Anggaran		Rp	3.408.867.666.146

Sekayu, Maret 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H.M. TOHA